

Revisi Program Perikanan MSC

Ringkasan usulan untuk konsultasi publik

Daftar Isi

Revisi Program Perikanan MSC	1
Pendahuluan.....	3
Tentang Revisi Program Perikanan.....	3
Revisi Standar Perikanan v3.1	5
Prinsip 2	5
Kategorisasi komponen spesies dan penetapan spesies Terancam Punah, Terancam, dan Dilindungi (ETP).....	5
Persyaratan hasil yang direvisi	8
Persyaratan pengelolaan yang direvisi	11
Persyaratan pemantauan	14
Persyaratan informasi yang direvisi	17
Prinsip 3	18
Pengenalan unsur penilaian yurisdiksi.....	18
Klarifikasi mengenai kerja sama internasional	20
Bagian SE	21
Penerapan Bagian SE pada stok ikan non-tuna	21
Revisi terhadap Perangkat Standar Perikanan v1.2	23
Alat A: Kerangka Kerja Berbasis Risiko	23
Alat B: Kerangka Persyaratan Bukti	26
Revisi terhadap Proses Sertifikasi Perikanan v3.1	29
Revisi terhadap Persyaratan Proses	29
Penentuan Unit Penilaian dan Unit Sertifikasi	29
Penilaian Unit Penilaian.....	30
Penetapan syarat.....	Error! Bookmark not defined.
Pengumuman Laporan Draf Komentar (ACDR) pada penilaian ulang dan klarifikasi terhadap proses (penilaian ulang)	34
Ketertelusuran dan keselarasan dengan Tinjauan Rantai Pengawasan (CoC) MSC ...	36

Tangkapan yang tidak dapat dipisahkan (sebelumnya dikenal sebagai tangkapan yang tidak dapat dipisahkan dan tangkapan yang secara praktis tidak dapat dipisahkan)....	38
Penambahan pada sertifikat perikanan (menambahkan nelayan lain yang memenuhi syarat, audit yang dipercepat, dan perluasan cakupan)	40
Pemisahan sertifikat	43
Revisi terhadap Lampiran PA.....	44
Persyaratan perluasan ruang lingkup	44
Revisi Lampiran PB.....	46
Proses harmonisasi dan hasilnya	46
Revisi Lampiran PC.....	48
Kompetensi pemimpin tim penilaian	48
Revisi terhadap Templat Pelaporan MSC.....	49
Templat Penilaian Perikanan	49
Templat Komentar Pemangku Kepentingan.....	51
Template Pernyataan Sertifikasi	52
Lembar Kerja Penilaian	52
Templat Pengumuman Penilaian Perikanan / Rencana Penilaian Ulang.....	52
Template Permintaan Informasi Klien (sebelumnya 'Daftar Periksa Dokumen Klien')	53
Penghapusan Rencana Tindakan Klien	53
Template Audit Pengawasan	53
Template Informasi Kapal	53

Pendahuluan

Dokumen ini memberikan gambaran umum mengenai perubahan yang diusulkan pada Standar Perikanan v3.1, Proses Sertifikasi Perikanan v3.1, dan Kotak Alat Standar Perikanan v1.2. Dokumen ini dimaksudkan untuk mendukung para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam konsultasi publik mengenai usulan tersebut.

Konsultasi ini dibuka selama 60 hari mulai 8 Oktober hingga 8 Desember 2026. Selama periode ini, para pemangku kepentingan diundang untuk meninjau usulan tersebut dan memberikan masukan melalui survei.

Para pemangku kepentingan dianjurkan untuk membaca ringkasan berikut bersamaan dengan draf usulan, yang memuat rincian lengkap mengenai semua perubahan yang diusulkan.

Tentang Revisi Program Perikanan

MSC meluncurkan [Revisi Program Perikanan](#) pada September 2025 untuk melakukan revisi yang diperlukan dan terarah terhadap Standar Perikanan v3.1 serta dokumen skema terkait.

Revisi ini sangat penting untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi setelah penerbitan versi 3 Standar tersebut. Meskipun versi Standar ini memperkenalkan persyaratan baru yang penting, seperti penilaian eksplisit terhadap kehilangan alat tangkap dan persyaratan untuk kebijakan Sirip yang Masih Menempel Secara Alami (Fins Naturally Attached), muncul kekhawatiran bahwa beberapa persyaratan terlalu rumit dan sulit untuk diaudit. Ada juga kekhawatiran bahwa beberapa persyaratan menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi beberapa perikanan berkinerja terbaik yang telah disertifikasi berdasarkan versi sebelumnya.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, MSC bekerja sama dengan para asesor perikanan, serta perwakilan dari sektor perikanan dan NGO untuk mengembangkan dan menguji revisi tersebut. Pendekatan kolaboratif ini memastikan masukan dari berbagai perspektif dan keahlian yang lebih luas, sehingga membantu memastikan bahwa persyaratan yang direvisi dapat diterapkan secara konsisten dan mendapatkan hasil keberlanjutan yang diharapkan.

Revisi terhadap Standar Perikanan v3.1

Prinsip 2

Kategorisasi komponen spesies dan penetapan spesies Spesies Langka, Terancam Punah, dan Dilindungi (ETP)

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA3.1 “Persyaratan umum untuk Prinsip 2”
- SA3.5 “Klasifikasi spesies ikan dan invertebrata”
- SA3.9 “Klasifikasi spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi”

Informasi latar belakang

Masalah terkait pengelompokan ETP dengan spesies di luar cakupan (OOS)

Masukan dari penerapan v3 dan v3.1 Standar Perikanan menunjukkan bahwa persyaratan untuk mengkategorikan spesies sebagai Terancam Punah, Terancam, dan Dilindungi (ETP) serta pengelompokan otomatis spesies di luar cakupan dengan spesies ETP terlalu berhati-hati, rumit, dan memberatkan. Sebaliknya, v2.01 mengecualikan beberapa spesies kunci, seperti spesies hiu tertentu, yang seharusnya secara wajar dipertimbangkan dalam ketentuan ETP dan karenanya tunduk pada standar kinerja yang lebih tinggi.

Masalah terkait konsep ‘spesies yang dapat diabaikan’

Sebuah persyaratan diperkenalkan dalam v3 yang berarti interaksi dengan spesies tangkapan sampingan dianggap ‘dapat diabaikan’ jika terbukti rendah. Klasifikasi ‘dapat diabaikan’ berarti tidak ada pertimbangan lebih lanjut dalam penilaian perikanan.

Untuk spesies ikan dan invertebrata, hal ini berlaku jika spesies tersebut menyumbang kurang dari 2% dari total tangkapan. Untuk spesies di luar cakupan, hal ini berlaku jika kurang dari 10 individu ditangkap per tahun dan populasi pembiakan cukup besar.

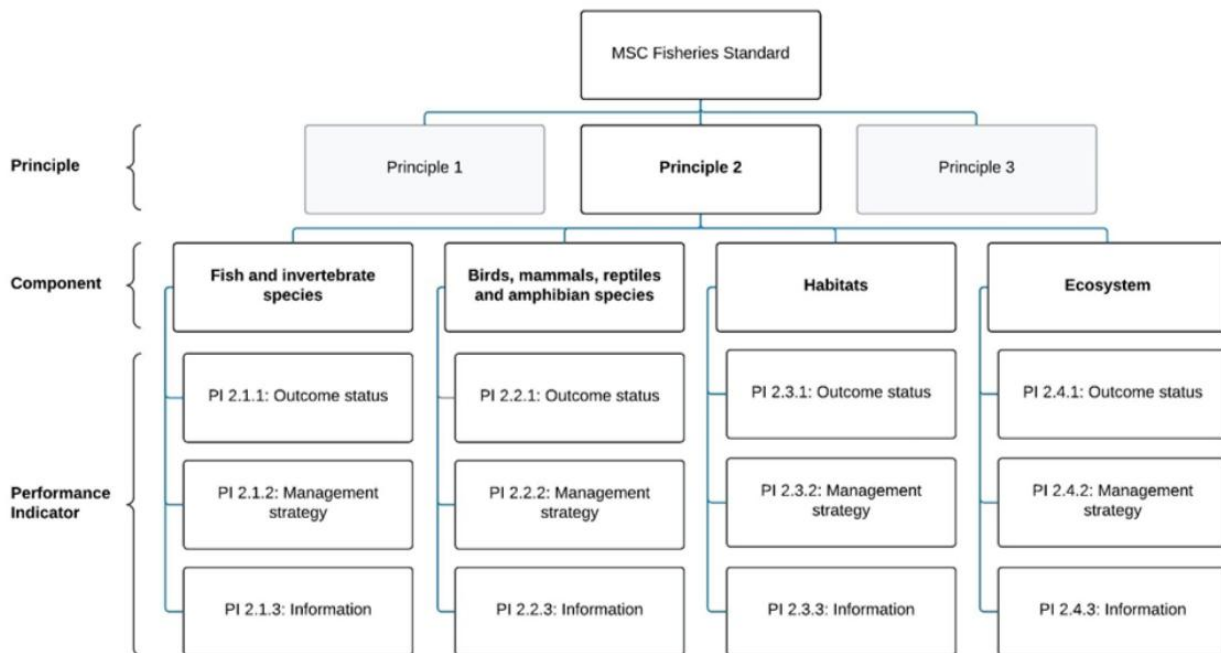
Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu memberikan tindakan pencegahan yang memadai bagi spesies yang lambat mencapai kematangan dan bereproduksi. Hal ini mencakup beberapa spesies hiu yang terancam punah, karena tingkat tangkapan sampingan yang rendah sekalipun dari spesies ini dapat berdampak signifikan.

Ringkasan usulan

Revisi yang diusulkan menetapkan kerangka kerja yang lebih seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, memastikan spesies dikategorikan sebagai ETP hanya jika sesuai, berdasarkan status konservasi dan daftar internasional atau nasional yang relevan (misalnya, CITES, CMS, dan Daftar Merah IUCN). Pendekatan ini menggabungkan taksonomi dan perihal konservasi, dengan mengakui dua komponen utama: (i) spesies ikan dan invertebrata, dan (ii) taksonomi di luar cakupan (spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi). Di dalam komponen-komponen tersebut, spesies dikategorikan sebagai ETP sesuai dengan daftar atau penilaian yang relevan, sedangkan spesies non-ETP dinilai sebagai utama atau minor (untuk ikan dan invertebrata) atau sebagai non-ETP (untuk taksonomi di luar cakupan).

Kerangka kerja kategorisasi yang direvisi ini bertujuan untuk mewujudkan maksud awal, yaitu memastikan bahwa spesies yang terancam punah atau menjadi perhatian utama mendapat pertimbangan yang sesuai dalam Standar ini, dan bahwa spesies yang dikelola dengan baik atau memiliki tingkat keprihatinan konservasi rendah dapat dinilai secara tepat berdasarkan Prinsip 2. Untuk spesies ikan dan invertebrata, hal ini juga berarti memastikan bahwa spesies yang sesuai tetap memenuhi syarat untuk dinilai berdasarkan Prinsip 1.

Revisi ini juga menghapus kriteria modifikasi sebelumnya, yaitu klausul “*opt out*” yang efektif dalam v3 yang memungkinkan suatu spesies tidak dianggap sebagai ETP jika kriteria tertentu terkait karakteristik siklus hidup, status pengelolaan, dan status stok terpenuhi. Penghapusan kriteria modifikasi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penilaian dan meningkatkan efisiensi.



Gambar1 Pohon Penilaian baku yang Direvisi untuk Prinsip 2

Dengan kategorisasi yang telah diperbarui, konsep “dapat diabaikan” dianggap kurang berhati-hati untuk penilaian P2, sehingga mengakibatkan beberapa spesies rentan tidak dinilai dengan semestinya; oleh karena itu, konsep tersebut telah dihapus. Sebagai gantinya, asesor dapat memutuskan apakah akan memberikan skor pada semua spesies minor pada tingkat SG100 untuk perihal penilaian tertentu. Taksonomi non-ETP yang berada di luar cakupan selalu dinilai.

Persyaratan **hasil** yang direvisi untuk komponen spesies

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA3.1 “Persyaratan umum dalam Prinsip 2”
- SA3.2 “Persyaratan umum untuk IK hasil”
- SA3.6 “PI hasil spesies ikan dan invertebrata” (PI 2.1.1)
- SA3.10 “PI hasil spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi” (PI 2.2.1)

Informasi latar belakang

Masalah terkait titik acuan ‘Status Konservasi yang Menguntungkan’

Berdasarkan v3.1, asesor diwajibkan untuk mempertimbangkan apakah suatu perikanan berdampak pada kemampuan populasi untuk pulih hingga ambang batas yang dikenal sebagai Status Konservasi yang Menguntungkan/*Favourable Conservation Status* (FCS) – minimal ‘50% dari tingkat populasi tanpa gangguan dalam tiga generasi atau 100 tahun, mana yang lebih singkat.’

Hal ini bertujuan untuk memastikan penilaian lebih dapat diukur, namun dalam praktiknya banyak perikanan yang tidak memiliki data yang diperlukan untuk memenuhi FCS. Untuk banyak spesies, informasi mengenai apa yang dimaksud dengan FCS tidak tersedia dan badan pengelola biasanya tidak mengumpulkan data tersebut untuk spesies di luar cakupan yang memiliki tingkat keprihatinan konservasi rendah.

Masalah terkait penanganan ‘kematian yang tidak teramati’

V3.1 juga mewajibkan asesor untuk mengukur angka kematian yang tidak teramati (misalnya kematian akibat stres dari interaksi dengan alat tangkap) pada spesies ETP dan spesies di luar cakupan, selain angka kematian yang teramati. Dalam praktiknya, asesor mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan mengenai angka kematian yang tidak teramati dan mengemukakan kekhawatiran mengenai kelayakan persyaratan ini.

Ringkasan usulan

Perubahan pada titik acuan ‘Status Konservasi yang Menguntungkan’

FCS dianggap sebagai titik acuan yang tidak tepat untuk spesies ETP dan spesies di luar cakupan karena keterbatasan ketersediaan data dan penerapan yang belum memadai dalam sistem pengelolaan perikanan di seluruh dunia. Telah diambil keputusan untuk mengusulkan bahasa penilaian alternatif yang lebih sesuai untuk kelompok spesies yang dimaksud.

Pendekatan yang direvisi ini memperkenalkan fokus baru pada dampak langsung dari unit penilaian “tidak menghambat pemulihan” sebagai ekspresi hasil yang lebih tepat. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi titik acuan, tujuan konservasi, dan pendekatan pengelolaan yang berbeda, dibandingkan dengan persyaratan eksplisit sebelumnya untuk FCS. Pendekatan ini juga lebih selaras dengan Versi 2.01 dari Standar tersebut.

Pada tingkat SG100, logikanya tetap mempertahankan keterkaitan dengan konsep FCS dengan mensyaratkan bahwa pemulihan tidak terhambat hingga mencapai laju pemulihan yang telah ditentukan atau status yang telah ditentukan/ditingkatkan. Namun, hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “status yang ditingkatkan” dibandingkan dengan v3.1, di mana FCS merupakan persyaratan eksplisit.

Perubahan dalam penanganan mortalitas yang tidak teramati

Persyaratan untuk mortalitas yang tidak teramati berkaitan dengan dua bagian berbeda dari P2: identifikasi elemen penilaian pada awal penilaian P2, dan penilaian indikator hasil (PI).

Untuk mengatasi masalah terkait kejelasan dan efektivitas, beberapa perubahan telah dilakukan di kedua bagian tersebut. Pertama-tama, proses identifikasi elemen penilaian telah direvisi dan disederhanakan. Tim penilaian diwajibkan untuk menyusun daftar spesies yang mencakup spesies dalam profil tangkapan, spesies di luar profil tangkapan yang terkena dampak langsung dari Unit Penilaian (UoA) (termasuk kematian yang tidak teramati terkait operasi penangkapan ikan), serta spesies umpan hasil tangkapan liar.

Definisi baru mengenai “dampak langsung” telah dimasukkan untuk memperjelas jenis interaksi yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi spesies yang tidak tercantum dalam profil tangkapan. Definisi tersebut mencakup cedera dan kematian akibat interaksi dengan operasi penangkapan ikan, termasuk alat tangkap, kapal, dan peralatan terkait, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bahwa spesies dapat terpengaruh secara langsung meskipun tidak tercantum dalam profil tangkapan.

Masalah utama dalam Standar v3.1 adalah penggabungan kematian yang tidak teramati dengan persyaratan evaluasi kuantitatif dampak UoA terkait Status Konservasi yang Menguntungkan. Asesor melaporkan kesulitan dalam mengkuantifikasi kematian yang tidak teramati di mana bukti terbatas.

Dalam usulan ini, tim masih diharapkan untuk mempertimbangkan kematian yang teramati dan tidak teramati, sebanding dengan informasi yang tersedia. Penghapusan Status Konservasi yang Menguntungkan sebagai titik acuan diharapkan dapat mengurangi masalah

kelayakan yang terkait dengan kematian yang tidak teramati dan kurangnya informasi kuantitatif.

Persyaratan **pengelolaan** yang telah direvisi untuk komponen spesies

Referensi dalam Standar DRAFT v4.0

- SA3.1 “Persyaratan umum dalam Prinsip 2”
- SA3.3 “Persyaratan umum untuk PI pengelolaan”
- SA3.7 “PI pengelolaan spesies ikan dan invertebrata” (PI 2.1.2)
- SA3.11 “PI pengelolaan spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi” (PI 2.2.2)

Informasi latar belakang

Beberapa masalah diangkat terkait persyaratan pengelolaan untuk komponen spesies dalam Prinsip 2. Redaksi saat ini dapat mencampuradukkan jenis atau responsivitas pengelolaan yang diterapkan dengan efektivitasnya yang sebenarnya. Dengan revisi ini, MSC bertujuan untuk memberikan perbedaan yang lebih jelas antara penilaian apakah pengelolaan telah diterapkan, dan efektivitas pengelolaan tersebut.

Selain itu, dalam v3.1, telah diperkenalkan persyaratan bagi perikanan untuk menunjukkan bagaimana kematian spesies ETP dan spesies di luar cakupan dapat diminimalkan secara efektif. Asesor melaporkan kesulitan dalam menafsirkan arti ‘diminimalkan’ dalam praktiknya. Mereka juga mengidentifikasi konflik antara persyaratan dan peraturan yang ditetapkan oleh badan pengelolaan yang mengizinkan penahanan spesies tersebut.

Ringkasan usulan

Perihal Penilaian (SIs) (a) (pengelolaan spesies ETP), (b) (pengelolaan non-ETP/utama dan sekunder), dan (c) (pelaksanaan pengelolaan)

Ada beberapa perubahan yang diusulkan terhadap Indikator Kinerja (IK) pengelolaan dalam Prinsip 2. Untuk memberikan perbedaan yang lebih jelas antara “pengelolaan ada” dan “pengelolaan efektif”, pedoman penilaian telah direvisi.

Struktur yang direvisi ini dimaksudkan untuk membuat pertanyaan penilaian lebih jelas dengan perkembangan yang lebih konsisten dan bertahap di seluruh Patokan Penilaian. SI(a) dan SI(b) menanyakan apakah ada jenis pengaturan pengelolaan yang sesuai untuk elemen penilaian yang relevan yang sejalan dengan tingkat Hasil MSC SG80 yang relevan. SI(c) menanyakan apakah pengelolaan tersebut telah dilaksanakan.

Konsep “meminimalkan”

Persyaratan sebelumnya untuk “meminimalkan” dampak dianggap sulit untuk dinilai dalam praktiknya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi banyak spesies umum yang berinteraksi

dengan perikanan bersertifikat, terutama ketika istilah “meminimalkan” sulit untuk didefinisikan atau diterapkan secara konsisten. Ada juga kekhawatiran bahwa hal tersebut tidak cukup berhati-hati, sehingga konsep tersebut telah dihapus.

Persyaratan yang diperbarui mengalihkan fokus ke arah memastikan adanya langkah-langkah pengelolaan yang efektif untuk:

- Mencegah dampak langsung dari UoA yang menghambat pemulihan spesies ETP, atau
- Memastikan bahwa spesies non-ETP tetap berada di atas titik acuan populasi yang sesuai (titik gangguan rekrutmen (PRI), jumlah tangkapan maksimum lestari (MSY), atau tingkat di mana reproduksi mungkin terancam serius).

Persyaratan tersebut kini berfokus pada memastikan bahwa sistem pengelolaan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan pada tingkat SG80 untuk kelompok spesies yang relevan. Harapan untuk spesies ETP adalah adanya strategi yang berlaku pada tingkat SG80 dan strategi komprehensif pada tingkat SG100, berbeda dengan strategi parsial pada tingkat SG80 dan strategi pada tingkat SG100 untuk spesies non-ETP.

Persyaratan pemotongan sirip hiu

Untuk pengelolaan spesies ikan dan invertebrata, isu penilaian praktik pemotongan sirip hiu tetap dipertahankan dalam P2, namun—bersama dengan isu penilaian praktik pemotongan sirip hiu dalam P1—telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan perubahan pada [Kerangka Persyaratan Bukti \(ERF\)](#). ERF merupakan alat baru dalam Toolbox Standar Perikanan MSC v1.2 untuk mengevaluasi kualitas informasi yang digunakan dalam suatu penilaian. Asesor wajib menggunakan ERF saat mengevaluasi apakah praktik pemotongan sirip hiu mungkin terjadi. MSC melarang praktik pemotongan sirip hiu di perikanan bersertifikat, dan usulan ini tidak mengubah persyaratan yang diperkenalkan dalam v3.1 yang mewajibkan perikanan memiliki kebijakan *Fins Naturally Attached* (FNA) atau kebijakan non-retensi untuk semua hiu yang ditangkap. Sebaliknya, perubahan yang diusulkan berfokus pada informasi yang tersedia dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Usulan ini bertujuan untuk secara eksplisit memberikan skor pada persyaratan kebijakan FNA atau kebijakan non-retensi sebagai persyaratan pengelolaan dan menambahkan bahwa kebijakan ini “diharapkan efektif”. Hal ini menggantikan persyaratan sebelumnya mengenai “tingkat kepastian yang tinggi bahwa praktik pemotongan sirip hiu tidak terjadi” dalam pedoman.

Sebagai bagian dari perubahan ini, usulan tersebut mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “diharapkan efektif”, yaitu:

- Tersedia informasi yang memadai untuk memperkirakan kepatuhan, dengan menggunakan ERF untuk mendukung penentuan ini; dan

- Tidak ada bukti objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan dalam perikanan tersebut.

MSC mengakui bahwa kebijakan FNA atau kebijakan non-retensi mungkin baru diterapkan dan berpotensi diperkenalkan di tingkat perikanan sebagai kebijakan operasional, misalnya di wilayah geografis yang tidak memiliki praktik pemotongan sirip hiu di masa lalu atau di mana peraturan FNA belum diperkenalkan melalui kebijakan pengelolaan. Istilah “diperkirakan akan efektif” dimaksudkan untuk menggambarkan situasi di mana terdapat bukti yang kredibel bahwa kebijakan baru tersebut akan berhasil mengeliminasi praktik pemotongan sirip hiu dari suatu perikanan. Misalnya, hal ini dapat didasarkan pada pemahaman yang baik mengenai kepatuhan perikanan tersebut terhadap peraturan atau kebijakan operasional lainnya, serta bukti keberhasilan implementasi awal. Bahkan dalam keadaan ini, informasi yang memadai tetap diperlukan untuk memenuhi persyaratan.

Persyaratan pemantauan

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA3.7 “PI pengelolaan spesies ikan dan invertebrata” (PI 2.1.2)
 - SA3.7.1 & GSA3.7.1
- SA3.11 “PI pengelolaan spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi” (PI 2.2.2)
 - SA3.11.1

Informasi latar belakang

MSC sedang merevisi tingkat kinerja yang diwajibkan bagi perikanan dalam hal pemantauan, termasuk ambang batas yang ditetapkan untuk pengamatan independen. Revisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspektasi terhadap perikanan ditetapkan secara tepat sesuai dengan praktik yang secara luas diterima dan diadopsi oleh lembaga pengelolaan perikanan.

Ambang batas pemantauan yang bersifat preskriptif pertama kali diperkenalkan dalam versi 3 Standar, yakni dalam Kerangka Persyaratan Bukti (ERF) yang baru. Ambang batas ini dipertahankan dalam versi 3.1, dengan perikanan di laut lepas yang dikelola oleh RFMO diwajibkan untuk menerapkan pengamatan independen terhadap setidaknya 30% dari kegiatan penangkapan ikan per tahun pada tingkat SG80. Pada tingkat minimum yang dapat diterima (SG60), semua perikanan diwajibkan melaporkan informasi tangkapan kepada otoritas pengelolaan dan menjalani verifikasi independen terhadap data tangkapan tersebut. Semua perikanan—bukan hanya yang berada di laut lepas—diwajibkan memiliki pengamatan independen terhadap data tangkapan untuk lolos tanpa kondisi pada tingkat SG80. Pada tingkat SG100, perikanan diwajibkan melakukan sensus lengkap terhadap tangkapan menggunakan pengamatan independen.

Selama Tinjauan Toolbox pada 2024–25, persyaratan pemantauan dipindahkan dari ERF ke Standar untuk memperjelas bahwa persyaratan tersebut merupakan persyaratan kinerja bagi perikanan, bukan bagi asesor. MSC melakukan tinjauan terhadap persyaratan tersebut yang telah dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari Revisi Program Perikanan.

Beberapa manfaat dan risiko diangkat oleh para pemangku kepentingan kami setelah penerbitan versi 3.1. Meskipun pengamatan independen melalui observer manusia atau program pemantauan elektronik (EM) secara umum dianggap sebagai praktik terbaik untuk mengumpulkan data tangkapan, persyaratan tersebut dikritik karena gagal memperhitungkan keragaman perikanan dalam program MSC dan kapasitas untuk menerapkan program-program tersebut, termasuk perikanan yang sangat selektif (misalnya, pengumpulan manual) atau pendekatan pemantauan alternatif (misalnya, armada acuan). Penting bagi MSC untuk mengkodifikasi praktik terbaik secara tepat dalam Standar, sekaligus memastikan persyaratan tersebut proporsional dengan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai jenis

perikanan dan mencerminkan pendekatan pemantauan yang sesuai di berbagai konteks pengelolaan.

Persyaratan SG60 khususnya dianggap secara efektif memberlakukan persyaratan lulus atau gagal untuk cakupan pengamat atau EM dalam banyak kasus. Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang ditugaskan oleh MSC¹, hal ini tidak terbukti sebagai ambang batas yang tepat untuk tingkat minimum yang dapat diterima.

Ringkasan usulan

Beberapa perubahan telah diusulkan di seluruh Standar untuk mengatasi kekhawatiran seputar persyaratan pemantauan, serta untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut jelas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam perubahan terkait [angka kematian yang tidak teramati](#), untuk mengidentifikasi spesies yang perlu dievaluasi dalam P2, diusulkan agar semua perikanan wajib menyediakan gambaran umum terbaru dan representatif mengenai hasil tangkapannya, yang dapat disusun dari beberapa sumber informasi. Tidak ada masalah penilaian tersendiri yang diusulkan untuk mengevaluasi verifikasi independen data dimaksud. Sebaliknya, hal ini akan dipertimbangkan saat menentukan kecukupan informasi menggunakan ERF. Pendekatan ini dianggap lebih kokoh, mencegah duplikasi, dan memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi asesor.

Perikanan dengan kapal yang beroperasi di laut lepas dianggap berisiko lebih tinggi, sehingga persyaratan pemantauan khusus telah dimasukkan untuk penilaian di bawah Indikator Kinerja (PI) pengelolaan pada P2. Persyaratan tersebut tertanam dalam definisi strategi pengelolaan, yang dinilai dalam PI 2.1.2.a dan b serta 2.2.2.a dan b.

Tidak ada persyaratan yang dimasukkan pada SG60, yang berarti tidak ada persyaratan lulus atau gagal untuk pengamatan independen dalam perikanan di laut lepas. Meskipun penelitian telah menunjukkan bahwa program pengamatan independen merupakan praktik terbaik dalam pengelolaan perikanan, tidaklah tepat untuk mewajibkannya pada tingkat minimum yang dapat diterima. Mempertahankan persyaratan pada SG60 berisiko mengecualikan banyak perikanan dan merusak Teori Perubahan MSC.

Untuk mencapai skor SG80, strategi pengelolaan perikanan di laut lepas harus mencakup tujuan kebijakan pengelolaan yang jelas mengenai pengamatan independen terhadap setidaknya 20% dari kegiatan penangkapan ikan setiap tahun. Setidaknya, perikanan di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan SG80 akan memerlukan syarat tertentu agar dapat mempertahankan sertifikasi dan lulus penilaian ulang di masa mendatang. Persyaratan 20%

¹ MRAG. 2025. *Meneliti verifikasi informasi dan tingkat cakupan pengamat/REM dalam perikanan di seluruh dunia*. Marine Stewardship Council, Maret 2025. [mrag-2025-information-verification-and-observer-coverage-levels.pdf](#)

pengamatan independen secara luas diterima sebagai praktik terbaik, dan semakin menjadi target yang diadopsi oleh lembaga pengelolaan. Hal ini sejalan dengan banyak rekomendasi ilmiah¹ dan mencerminkan momentum yang semakin kuat untuk meningkatkan cakupan di dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional. Hal ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan agar persyaratan dapat diterapkan secara realistis sekaligus menuntut perikanan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

Pada tingkat kinerja tertinggi, untuk mencapai skor SG100, tujuan kebijakan pengelolaan mensyaratkan pengamatan independen sebesar 100% dari setiap kegiatan penangkapan ikan setiap tahunnya untuk perikanan di laut lepas. Hal ini mewakili kinerja mutakhir dan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada perikanan yang mencapai tingkat pengamatan independen ini.

Pelaksanaan tujuan kebijakan pengelolaan ini akan dievaluasi berdasarkan SI(c) pengelolaan, yang bertujuan untuk menilai seberapa baik strategi pengelolaan diterapkan.

Terdapat pengecualian terhadap persyaratan ini untuk perikanan laut lepas yang menggunakan hupate, pancing tonda, dan pancing ulur). Pengecualian ini mencerminkan norma regulasi saat ini dan profil risiko yang lebih rendah yang secara luas diterima untuk jenis alat tangkap tertentu. Perikanan ini tetap diwajibkan untuk menyediakan profil tangkapan, dengan kecukupan informasi tersebut dievaluasi melalui ERF. Panduan baru juga meminta tim asesor untuk memeriksa bagaimana sistem pengelolaan memverifikasi data yang dilaporkan oleh nelayan dan apakah pemeriksaan tersebut cukup kuat untuk mendukung strategi pengelolaan.

Untuk melengkapi persyaratan pemantauan di laut lepas, panduan baru telah dimasukkan mengenai penggunaan pengamat manusia dan pemantauan elektronik untuk pengamatan independen, termasuk bagaimana cakupan, keterwakilan, dan tingkat peninjauan rekaman harus dipertimbangkan.

Secara keseluruhan, usulan persyaratan pemantauan tetap mempertahankan ekspektasi akan pemantauan yang kredibel sambil membuat perbedaan yang lebih tegas antara pengumpulan informasi dan pengelolaan perikanan secara efektif. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengurangi duplikasi, memungkinkan penggabungan berbagai sumber bukti, dan memberikan harapan yang lebih jelas, terutama untuk perikanan di laut lepas.

Persyaratan **informasi** yang direvisi untuk komponen spesies

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA3.1 “Persyaratan umum dalam Prinsip 2”
- SA3.4 “Persyaratan umum untuk PI informasi”
- SA3.8 “PI informasi spesies ikan dan invertebrata” (PI 2.1.3)
- SA3.12 “PI informasi spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi” (PI 2.2.3)
- SA3.15 “PI informasi habitat” (PI 2.3.3)
- Tautan ke: Draf Toolbox Standar Perikanan v2.0, Perangkat B

Informasi latar belakang

Beberapa masalah terkait penilaian informasi dalam Prinsip 2 2.1.3.a/b (Kecukupan informasi spesies ETP, utama, dan minor ikan dan invertebrata), 2.2.3.a/b (Kecukupan informasi spesies ETP dan non-ETP burung, mamalia, reptil, dan amfibi) 2.3.3.b (Kecukupan informasi untuk penilaian dampak terhadap habitat) mengharuskan penggunaan Kerangka Persyaratan Bukti (ERF). Tinjauan berkelanjutan terhadap ERF telah menghasilkan restrukturisasi kerangka tersebut menjadi serangkaian persyaratan prosedural yang harus diikuti oleh asesor saat mengevaluasi bukti. ERF yang telah direvisi juga disertakan dalam konsultasi ini, dan ringkasannya dapat ditemukan [di sini](#).

Seiring dengan ERF yang telah direvisi, perubahan juga dilakukan pada bahasa dalam Standar untuk masalah penilaian informasi tersebut guna memastikan keselarasan antara kedua dokumen.

Ringkasan usulan

Dalam Standar v3.1, suatu perikanan dapat lulus sertifikasi tanpa syarat jika informasi memadai untuk memperkirakan dampak perikanan tersebut dengan “tingkat akurasi tinggi” pada tingkat SG80 atau “tingkat akurasi sangat tinggi” pada tingkat SG100. MSC mengusulkan untuk menghapus referensi terhadap “tingkat akurasi” dari pedoman penilaian. Sebagai gantinya, asesor akan mempertimbangkan akurasi sebagai bagian dari proses dalam ERF, dan pedoman penilaian akan berfokus pada apakah informasi “cukup untuk memperkirakan” dampak perikanan pada tingkat SG80 dan “cukup untuk memperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi” pada tingkat SG100.

Bagian penting dari usulan ini adalah definisi baru untuk “perkiraan” dalam konteks P2 dan P3, yang berbunyi: “membuat perkiraan numerik berdasarkan data kuantitatif dan informasi kualitatif yang relevan”. Oleh karena itu, suatu perikanan diharuskan memiliki setidaknya beberapa informasi kuantitatif agar dapat lolos pada tingkat SG80.

Prinsip 3

Pengantar elemen penilaian yurisdiksi

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA4.1 “Persyaratan umum untuk Prinsip 3”
- Tautan ke: Bagian 7.5 dan Lampiran PB dalam Draf Proses Sertifikasi Perikanan v4.0

Informasi latar belakang

Dalam Standar v3.1 dan versi-versi sebelumnya, tim asesor wajib menetapkan unsur-unsur penilaian untuk Prinsip 1 dan 2. Namun, untuk Prinsip 3 (P3), persyaratan saat ini tidak secara spesifik menyebutkan apakah asesor dapat atau seharusnya menetapkan unsur-unsur penilaian. Ketidaktepatan ini telah menimbulkan tantangan dalam melakukan penilaian secara konsisten dan menyelaraskan kegiatan perikanan yang beroperasi di bawah beberapa yurisdiksi. Perubahan yang diusulkan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi yang lebih besar, terutama dalam kasus yang melibatkan beberapa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan/atau Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO).

Masalah terkait dalam P3 adalah tidak adanya panduan yang jelas mengenai yurisdiksi nasional dan internasional mana yang harus dimasukkan dalam penilaian. Dalam perikanan beragam bendera, pesisir, atau negara pelabuhan, beberapa bagian yang relevan dari sistem pengelolaan mungkin tidak dinilai sepenuhnya atau terlewatkan. Hal ini juga menimbulkan tantangan dalam mencapai hasil yang konsisten untuk P3 serta risiko kredibilitas jika bagian-bagian pengelolaan yang relevan tidak dipertimbangkan.

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan memperkenalkan pendekatan yang lebih jelas dan terstruktur dalam menilai Prinsip 3 pada perikanan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Diusulkan agar tim penilaian mengidentifikasi setiap yurisdiksi di bawah seluruh atau sebagian dari Unit Penilaian (UoA) beroperasi sebagai elemen penilaian P3. Untuk mendukung hal ini, definisi UoA telah direvisi untuk mencakup yurisdiksi, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut lepas, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs), dan negara bendera.

Usulan ini juga memperjelas yurisdiksi mana yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian. P3 akan secara eksplisit dikaitkan dengan yurisdiksi yang diidentifikasi saat mendefinisikan UoA, sehingga membantu memastikan bahwa sistem pengelolaan nasional atau internasional yang relevan telah diidentifikasi sebelum penilaian dimulai. Negara

pelabuhan akan dimasukkan sebagai elemen penilaian hanya jika pelabuhan pendaratan relevan dengan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan berdasarkan PI 3.2.3. Sistem pengelolaan formal, informal, dan tradisional akan tetap dipertimbangkan jika relevan.

Tim kemudian akan menentukan unsur penilaian yurisdiksi mana yang relevan dengan setiap Indikator Kinerja (PI) P3 dan isu penilaian (SI). Tidak dimaksudkan agar setiap yurisdiksi dinilai di bawah setiap PI atau SI; penerapan bergantung pada fungsi pengelolaan yang sedang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar yang konsisten dalam menilai berbagai sistem pengelolaan nasional dan internasional yang berlaku bagi suatu perikanan serta mendukung harmonisasi yang lebih besar antar penilaian.

Diusulkan agar pendekatan elemen penilaian terstruktur dijadikan metode penilaian standar untuk P3, namun tim asesor tetap memiliki fleksibilitas tertentu, terutama jika penilaian terhadap yurisdiksi individu secara terpisah tidak dapat secara akurat mencerminkan cara kerja sistem manajemen tertentu. Dalam kasus-kasus tersebut, bagian-bagian yang relevan dari sistem manajemen, atau UoA secara keseluruhan, dapat dinilai sebagai gantinya, asalkan tim menjelaskan alasan mengapa pendekatan elemen penilaian berbasis yurisdiksi tidak sesuai.

Perubahan yang diusulkan ini terutama dimaksudkan untuk memperjelas struktur dan penerapan penilaian P3, bukan untuk mengubah tingkat kinerja yang disyaratkan. Misalnya, PI 3.1.1.a akan tetap mensyaratkan adanya sistem hukum nasional yang efektif untuk semua UoA, disertai kerja sama internasional jika diperlukan. Panduan terkait juga akan diperbarui untuk mendukung penerapan yang konsisten terhadap persyaratan yang telah direvisi.

Klarifikasi mengenai kerja sama internasional

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- SA4.3 “Kerangka hukum dan/atau adat PI (PI 3.1.1)”

Informasi latar belakang

Dalam Standar v3.1, PI 3.1.1.a mensyaratkan sistem hukum nasional yang efektif dan kerja sama dengan pihak lain “jika diperlukan”. Namun, persyaratan terkait membedakan antara UoA yang tunduk pada kerja sama internasional dan yang tidak, tanpa terlebih dahulu menetapkan kapan kerja sama internasional diperlukan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa perikanan stok bersama tanpa kerja sama dapat diperlakukan lebih menguntungkan daripada perikanan di mana kerja sama ada tetapi tidak lengkap atau tidak efektif.

Redaksi PI 3.1.1.a juga menimbulkan ambiguitas seputar makna “jika diperlukan”. Dalam Standar v3.1, Redaksi ini muncul di SG60 dan SG80 tetapi tidak di SG100, sehingga tidak jelas apakah hal ini merujuk pada kebutuhan akan sistem hukum nasional yang efektif, kebutuhan akan kerja sama, atau keduanya. Hal ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda mengenai kapan kerja sama diperlukan dan penilaian yang tidak konsisten di antara perikanan yang beroperasi di bawah kondisi pengelolaan yang serupa.

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan memperjelas kapan kerja sama internasional diperlukan berdasarkan PI 3.1.1.a. Tim asesor akan terlebih dahulu menentukan apakah pengelolaan stok target Prinsip 1 memerlukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama akan dianggap diperlukan jika stok target dimanfaatkan bersama, melintasi batas negara, atau spesies ruaya jauh.

Rumusan PI 3.1.1.a juga telah direvisi sehingga frasa “jika diperlukan” diterapkan secara konsisten terhadap kerja sama pada SG60, SG80, dan SG100. Hal ini memisahkan pertanyaan mengenai apakah kerja sama diperlukan dari tingkat kerja sama yang diharapkan pada setiap patokan penilaian, sementara persyaratan adanya sistem hukum nasional yang efektif tetap berlaku untuk semua UoA.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memperjelas penerapan persyaratan kinerja yang ada.

Bagian SE

Penerapan Bagian SE pada stok ikan selain tuna

Referensi dalam DRAFT Standar v4.0

- Bagian SE: “Prinsip 1 untuk stok tuna yang dikelola oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional – normatif”

Informasi latar belakang

Bagian SE diperkenalkan dalam v3 untuk menyediakan jalur bagi perikanan yang dikelola oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) dalam mengadopsi strategi tangkap yang efektif. Perikanan semacam ini dapat menghadapi tantangan dalam memenuhi syarat sertifikasi MSC karena waktu yang dibutuhkan oleh RFMOs untuk mengembangkan dan mengadopsi strategi tangkap. Bagian SE bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Bagian SE telah diterapkan secara efektif dalam perikanan tuna yang dikelola oleh RFMO, namun kesulitan telah dilaporkan dalam perikanan non-tuna. Oleh karena itu, revisi ini berfokus pada penanganan kelayakan dan penerapan Bagian SE bagi RFMO non-tuna. Hal ini didasari oleh masukan dari asesor dan RFMO bahwa persyaratan saat ini mungkin menghalangi perikanan yang dikelola dengan baik untuk memperoleh atau mempertahankan sertifikasi MSC. Secara khusus, Bagian SE mensyaratkan Evaluasi Strategi Pengelolaan (MSE) untuk menilai efektivitas strategi tangkap, yang berarti RFMO non-tuna yang menggunakan metode evaluasi lain mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut meskipun strateginya efektif.

MSC juga sedang meninjau persyaratan masuk untuk Bagian SE di seluruh perikanan, termasuk apakah badan pengelola harus berkomitmen terhadap MSE sebelum Bagian SE dapat diterapkan dan, jika ya, bukti komitmen apa yang dapat diterima.

Ringkasan usulan

Revisi ini memperjelas penerapan yang dimaksudkan dari Bagian SE dengan membedakan antara perikanan tuna dan non-tuna yang dikelola oleh RFMO. Bagian SE telah diterapkan secara efektif dalam perikanan tuna yang dikelola oleh RFMO, di mana Bagian SE selaras dengan pendekatan yang telah ditetapkan dalam mengembangkan strategi tangkap. Penerapan Bagian SE kurang sesuai untuk perikanan non-tuna di mana terdapat perbedaan dalam pendekatan pengelolaan.

Untuk mencerminkan hal ini, penerapan wajib Bagian SE akan dibatasi pada lima spesies tuna yang saat ini tercakup dalam pendekatan tersebut: tuna *albacore*, tuna sirip kuning, tuna mata besar, tuna cakalang, dan tuna sirip biru. Perikanan lain yang dikelola oleh RFMO dapat menerapkan Bagian SE secara sukarela jika persyaratannya sesuai dengan konteks pengelolaan mereka. Ekspektasi kinerja di SG100 tetap tidak berubah.

Usulan ini juga menghapus persyaratan masuk Bagian SE (SE 1.1.3), yang mewajibkan badan pengelola untuk menunjukkan komitmen sebelumnya untuk melakukan MSE sebelum Bagian SE dapat diterapkan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menciptakan hambatan tambahan dalam penggunaan Bagian SE dan mungkin menduplikasi persyaratan Proses Sertifikasi Perikanan (FCP) yang sudah ada.

Berdasarkan FCP, Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB) telah memverifikasi kelayakan Rencana Aksi Klien dan komitmen pihak ketiga yang relevan ketika persyaratan telah ditetapkan. Oleh karena itu, penghapusan persyaratan masuk ini akan memungkinkan komitmen-komitmen tersebut diverifikasi melalui proses FCP yang telah mapan, bukan sebagai prasyarat untuk menerapkan Bagian SE.

Revisi terhadap Toolbox Standar Perikanan v1.2

Perangkat A: Kerangka Kerja Berbasis Risiko

Referensi dalam DRAFT Toolbox v2.0

- Perangkat A: Kerangka Kerja Berbasis Risiko

Informasi latar belakang

Kerangka Kerja Berbasis Risiko (RBF) adalah kerangka kerja perangkat wajib yang digunakan untuk menilai dan memberi skor perikanan dalam skenario kekurangan data berdasarkan Indikator Kinerja tertentu. Alat-alat tersebut meliputi Analisis Konsekuensi (CA), Analisis Kerentanan Produktivitas (PSA), Analisis Spasial Konsekuensi (CSA), dan Analisis Konsekuensi Skala Intensitas (SICA).

Umpan balik setelah penerapan v3 dari Standar dan Toolbox mengidentifikasi tantangan dalam penerapan Kerangka Kerja Berbasis Risiko. Tantangan ini diperparah oleh kemungkinan bahwa RBF akan lebih sering diterapkan dalam v3 dan kembali di bawah v3.1.

Empat tantangan awalnya diprioritaskan:

1. Memperjelas bagaimana Indikator Kinerja manajemen dinilai saat RBF digunakan,
2. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam RBF,
3. Menangani kondisi dengan Analisis Kerentanan Produktivitas (PSA), dan
4. Secara umum memperbaiki inefisiensi dan inkonsistensi.

Perbaikan kecil telah dilakukan untuk menangani dua bidang pertama. Revisi yang lebih substansial dilakukan pada dua bidang terakhir, termasuk perubahan pada cara penilaian skor melalui RBF, perubahan pada persyaratan pemicu penggunaan RBF untuk spesies P2, serta perbaikan lainnya.

Ringkasan usulan

RBF akan terus menjadi cara untuk menilai perikanan yang tidak memiliki informasi cukup untuk menggunakan pohon penilaian default. Revisi yang diusulkan dimaksudkan agar RBF lebih berhati-hati, lebih efisien, dan lebih mudah diterapkan secara konsisten, sekaligus memungkinkan bukti terbaik yang tersedia menjadi dasar keputusan penilaian.

Memperjelas kapan RBF diterapkan

Persyaratan pemicu untuk RBF telah direvisi untuk memperjelas bahwa perikanan harus dinilai menggunakan pohon penilaian *default* yang relevan di mana pun informasi yang memadai tersedia, penggunaan RBF hanya digunakan jika informasi yang tersedia tidak cukup untuk menentukan secara analitis dampak langsung UoA terhadap elemen penilaian yang berlaku. Persyaratan yang direvisi memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai apa yang dimaksud dengan informasi yang memadai. Hal ini mencakup definisi “menentukan secara analitis” sebagai memiliki tingkat mortalitas atau interaksi terkait UoA yang bersifat kuantitatif atau semi-kuantitatif untuk elemen penilaian tersebut, serta kemampuan untuk mengaitkan tingkat-tingkat tersebut dengan status populasi atau tujuan pemulihan untuk elemen penilaian tersebut. Hal ini memperjelas bahwa informasi kuantitatif yang cukup kuat atau informasi semi-kuantitatif yang didukung dengan baik memungkinkan penerapan pohon penilaian *default*, sedangkan ketiadaan informasi tersebutlah yang memicu penggunaan RBF. Oleh karena itu, perubahan ini menetapkan ambang batas berbasis informasi yang lebih jelas untuk menentukan kapan pendekatan penilaian *default* dapat digunakan dan kapan RBF diperlukan.

Persyaratan pemicu juga telah diperbarui agar selaras dengan perubahan yang diusulkan di bagian lain dalam dokumen skema. Untuk spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi, status konservasi yang baik tidak lagi diperlukan untuk menentukan apakah RBF dipicu. Persyaratan tersebut juga secara eksplisit membahas spesies kunci pada tingkat trofik rendah berdasarkan Prinsip 1. Pendekatan yang ada untuk menerapkan RBF pada habitat sebagian besar dipertahankan, dengan alat Analisis Spasial Dampak (CSA) yang spesifik untuk habitat disederhanakan untuk menghilangkan terminologi dan kompleksitas yang tidak perlu.

Meningkatkan cara penggunaan hasil RBF dalam penilaian

Cara hasil RBF berkontribusi pada penilaian spesies dan habitat Prinsip 2 juga telah direvisi. Alih-alih memiliki kemampuan untuk menyesuaikan skor RBF untuk suatu elemen penilaian naik atau turun dengan jumlah poin tetap, tim asesor akan mempertimbangkan hasil risiko RBF bersama dengan bukti relevan dan andal lainnya saat menentukan apakah suatu perikanan memenuhi Pedoman Penilaian yang lebih tinggi dalam pohon penilaian yang relevan.

Apabila tidak ada bukti yang lebih baik, hasil penilaian risiko RBF akan tetap menjadi dasar penentuan skor untuk elemen penilaian tersebut. Namun, apabila terdapat bukti kredibel lainnya, bukti tersebut dapat dipertimbangkan bersamaan dengan hasil RBF. Hal ini dimaksudkan untuk membuat penentuan skor lebih transparan dan menghindari situasi di

mana hasil RBF menghalangi pertimbangan informasi tambahan yang relevan, sehingga menjebak suatu spesies, dan dalam beberapa kasus menghalangi pencabutan status.

Untuk melengkapi hal ini dan memastikan ketelitian diterapkan saat menilai informasi yang digunakan dalam penilaian, PI informasi alternatif RBF telah dihapus, dan diganti dengan PI informasi default serta penerapan ERF.

Usulan ini juga menjelaskan bagaimana kinerja pengelolaan dinilai dalam pohon penilaian default ketika RBF telah digunakan.

Meningkatkan efisiensi keterlibatan pemangku kepentingan

Proses keterlibatan dengan pemangku kepentingan saat RBF digunakan telah disederhanakan. Alih-alih mengandalkan pengumuman RBF terpisah, informasi RBF yang relevan akan dimasukkan ke dalam pengumuman penilaian perikanan utama, termasuk informasi mengenai kesenjangan data penting dan, jika sesuai, skor draf RBF .

Penyampaian informasi ini lebih awal dalam proses penilaian dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih jelas kepada pemangku kepentingan untuk menyumbangkan informasi yang relevan dan mengidentifikasi masalah dalam penilaian. Usulan ini juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara tim asesor melibatkan pemangku kepentingan dan bagaimana pemangku kepentingan dapat memberikan masukan mengenai penggunaan RBF.

Memperbarui lembar kerja dan menyelaraskan dengan usulan lainnya

Terakhir, kerangka kerja dan lembar kerja pendukungnya telah diperbarui untuk mencerminkan komponen spesies yang direvisi (ikan dan invertebrata serta burung, mamalia, reptil, dan amfibi, dengan ETP terintegrasi di dalamnya). Metode yang telah ditetapkan untuk mendefinisikan habitat tetap dipertahankan, dengan beberapa terminologi dan redaksi dalam perangkap khusus habitat (CSA) disederhanakan.

Secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan bertujuan untuk menjadikan RBF lebih berhati-hati, lebih efisien, serta lebih mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten, sambil tetap memastikan bahwa bukti terbaik yang tersedia digunakan sebagai dasar penilaian.

Alat B: Kerangka Persyaratan Bukti (Evidence Requirements Framework)

Referensi dalam DRAFT Toolbox v2.0

- Perangkat B: Kerangka Persyaratan Bukti

Informasi latar belakang

Kerangka Persyaratan Bukti (ERF) adalah metode untuk mengevaluasi informasi yang digunakan untuk menilai keberlanjutan perikanan berdasarkan Standar Perikanan MSC. Asesor wajib menggunakan ERF untuk Indikator Kinerja tertentu dalam Standar tersebut.

ERF merupakan penambahan baru yang signifikan pada Versi 3 Standar Perikanan, namun berbagai masalah teridentifikasi setelah diperkenalkan. Masalah tersebut mencakup kekhawatiran bahwa Kerangka Kerja ini terlalu rumit bagi asesor untuk diterapkan dan menciptakan hambatan tak terduga untuk sertifikasi bagi banyak perikanan yang dikelola dengan baik.

Tinjauan *Toolbox*, yang berlangsung pada tahun 2024–2025 (sebelum dimasukkan ke dalam alur kerja Revisi Program Perikanan), menghasilkan usulan perubahan signifikan terhadap struktur dan persyaratan ERF. Tujuan tinjauan ini adalah untuk memperjelas maksud ERF, menyederhanakan penggunaannya oleh tim asesor, serta memastikan konsistensi bahasa antara Standar dan bahasa yang digunakan dalam ERF.

Perubahan-perubahan tersebut telah dipertahankan dalam program kerja ini dan disajikan kembali di bawah ini untuk masukan publik.

Ringkasan usulan

ERF tetap menjadi alat bagi asesor untuk mengevaluasi bukti. Namun, usulan tersebut telah menyempurnakan ruang lingkup ERF guna memberikan struktur yang jelas kepada asesor dalam melaksanakan dan mendokumentasikan evaluasi tersebut. Persyaratan terkait kinerja perikanan, seperti persyaratan yang berkaitan dengan pemantauan tangkapan, telah dihapus dan dimasukkan kembali ke dalam Standar.

ERF yang telah dirumuskan ulang merupakan serangkaian persyaratan prosedural yang harus diikuti oleh asesor saat mengevaluasi bukti.

Untuk menyederhanakan proses penggunaan ERF, usulan ini menghapus sistem penilaian bertahap dari versi asli, yang mencakup pedoman spesifik mengenai ‘kebenaran’ dan ‘ketepatan’ sebagai tolok ukur kualitas informasi. Asesor tetap diwajibkan untuk secara langsung mempertimbangkan keakuratan informasi yang tersedia mengenai suatu perikanan. Untuk melakukannya, asesor akan mempertimbangkan objektivitas, relevansi,

kelengkapan, dan konsistensi sumber informasi serta bagaimana potensi bias diatasi. Melalui persyaratan ini, konsep inti yang mendefinisikan keakuratan informasi tetap dipertahankan dalam usulan baru tanpa tolok ukur penilaian sementara dalam ERF.

Pertimbangan akurasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi tim dalam menentukan apakah informasi tersebut memadai untuk memenuhi persyaratan Standar. Asesor harus mendokumentasikan bagaimana mereka menggunakan ERF untuk mencapai kesimpulan penilaian akhir.

Dalam ERF yang telah direvisi, keakuratan informasi merupakan pertimbangan utama dalam proses tersebut, yang pada akhirnya menjadi dasar penilaian mengenai kecukupan informasi secara keseluruhan untuk memenuhi pedoman penilaian.

Perubahan ini memperjelas kapan asesor dapat menerapkan penilaian ahli.

Usulan ini meningkatkan transparansi mengenai kapan asesor harus menerapkan penilaian ahli mereka, mengingat beragamnya konteks perikanan di dunia nyata. Usulan ini mengakui bahwa tingkat akurasi yang lebih tinggi diperlukan pada perikanan yang memiliki potensi dampak yang lebih besar.

Asesor diharapkan untuk meminta informasi berkualitas lebih tinggi atau menerapkan kehati-hatian yang lebih besar saat memberikan skor pada perikanan yang kemungkinan besar memiliki dampak dan risiko keberlanjutan yang lebih besar. Sebaliknya, untuk perikanan di mana asesor dapat secara wajar membenarkan bahwa risiko dampaknya lebih rendah, tim dapat menyimpulkan bahwa informasi berkualitas lebih rendah masih memadai untuk memenuhi persyaratan dalam Standar. Dalam semua kasus, keputusan ini harus didokumentasikan dengan jelas dan kuat.

Perubahan lain yang berasal dari ERF

Masalah penilaian kepatuhan, baik di P2 maupun P3 (2.3.2.c informasi mengenai kepatuhan terhadap persyaratan pengelolaan untuk habitat yang lebih sensitif dan 3.2.3.c informasi kepatuhan), telah direvisi untuk menjaga konsistensi dengan ERF. “Tingkat akurasi” yang semakin meningkat untuk masalah penilaian kepatuhan telah dihapus, dan diganti dengan pertimbangan apakah informasi tersebut “cukup untuk memperkirakan” kepatuhan pada SG80 dan “cukup untuk pemahaman terperinci” mengenai kepatuhan perikanan pada SG100.

Perubahan ini bertujuan untuk menekankan bahwa asesor sering kali perlu membangun gambaran kepatuhan dalam suatu perikanan dengan menggunakan sumber informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Perubahan ini juga bertujuan untuk mengakui sifat informasi kepatuhan yang kompleks, sensitif, dan seringkali sulit diakses – dengan menyadari bahwa bahkan beberapa sistem pemantauan terbaik di dunia mungkin tidak memiliki data yang

sangat akurat mengenai kepatuhan terhadap peraturan tertentu². Pada saat yang sama, perubahan ini menegaskan perlunya setidaknya beberapa data kuantitatif mengenai kepatuhan untuk mencapai SG80 tanpa syarat.

² Hønneland, G. 2025. *Apa yang kita ketahui tentang kepatuhan dalam perikanan?* Marine Stewardship Council, April 2025. [Apa yang Kita Ketahui tentang Kepatuhan dalam Perikanan?](#)

Revisi terhadap Proses Sertifikasi Perikanan v3.1

Revisi Persyaratan Proses

Penentuan Unit Penilaian dan Unit Sertifikasi

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.5 “Ruang lingkup penilaian: Mendefinisikan UoA dan UoC yang diusulkan”

Informasi latar belakang

Untuk menyelaraskan dengan perubahan yang diusulkan di bagian lain dalam FCP, persyaratan untuk mendefinisikan Unit Penilaian (UoA) dan Unit Sertifikasi yang diusulkan (UoC) telah direvisi demi konsistensi dan kejelasan.

Ringkasan usulan

Bagian 7.5 telah direvisi untuk memberikan pendekatan yang lebih jelas dan terstruktur dalam mendefinisikan Unit Penilaian (UoA) dan Unit Sertifikasi (UoC). Persyaratan telah diurutkan ulang dan didukung oleh panduan baru untuk meningkatkan konsistensi dengan perubahan di bagian lain dalam FCP.

Revisi ini lebih menekankan pada identifikasi yang jelas terhadap armada, kapal, kelompok, atau operator penangkapan ikan yang termasuk dalam UoA dan UoC, karena hal ini menentukan proses yang berlaku jika entitas tambahan kemudian ditambahkan ke dalam sertifikat (lihat [penambahan pada sertifikat perikanan](#)).

Definisi UoA dan UoC juga telah diperbarui untuk secara eksplisit mengidentifikasi yurisdiksi atau yurisdiksi di mana perikanan beroperasi. Hal ini mendukung [pendekatan Prinsip 3 yang direvisi](#), di mana yurisdiksi yang relevan diidentifikasi sebagai elemen penilaian, dan memberikan dasar yang lebih jelas untuk menentukan sistem pengelolaan mana yang harus dievaluasi.

Penilaian Unit Penilaian

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.15 “Penilaian UoA”

Informasi latar belakang

Sebagai bagian dari revisi FCP, MSC bertujuan untuk memperjelas proses penilaian dan memastikan hasil penilaian transparan dan konsisten. Hal ini mencakup klarifikasi definisi elemen penilaian dan di mana elemen tersebut berlaku, serta mempertimbangkan bagaimana asesor harus menggabungkan skor elemen dan unit penilaian (UoA) yang berbeda dalam Indikator Kinerja yang sama.

Saat ini, persyaratan tersebut menimbulkan ambiguitas dalam menentukan skor dan, tergantung pada cara perhitungan dilakukan, dapat berdampak signifikan terhadap hasil penilaian perikanan.

Tinjauan ini juga mempertimbangkan bagaimana skor yang diperoleh melalui [Kerangka Kerja Berbasis Risiko \(RBF\)](#) harus digabungkan dengan skor non-RBF dalam Indikator Kinerja yang sama.

Ringkasan usulan

Proses penilaian telah disusun ulang dan disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Petunjuk penilaian telah disusun dalam bentuk tabel (Tabel 1). Skor akan terus ditentukan dalam kelipatan lima poin, dan hal ini dijelaskan dengan jelas dalam tabel petunjuk. Tim penilaian akan mengevaluasi elemen penilaian berdasarkan setiap Pedoman Penilaian yang relevan, kemudian menerapkan petunjuk dalam Tabel 1 pada elemen penilaian tersebut untuk menghitung skor keseluruhan Indikator Kinerja. Definisi eksplisit untuk elemen penilaian dan di mana elemen tersebut berlaku telah dimasukkan dalam Standar Perikanan MSC. Proses yang disederhanakan ini menggantikan pendekatan penilaian dua langkah yang lebih rumit yang sebelumnya digunakan.

Persyaratan yang mengizinkan pemberian nilai parsial dan modifikasi nilai telah dihapus demi pendekatan yang lebih transparan dan jelas sebagaimana diatur dalam Tabel 1.

Pendekatan yang disederhanakan ini juga akan berlaku saat Kerangka Kerja Berbasis Risiko digunakan untuk menilai suatu elemen penilaian, sehingga kini terdapat satu set petunjuk

tunggal untuk menentukan skor Indikator Kinerja secara keseluruhan yang berlaku di seluruh dokumen skema.

Secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan pada proses penilaian dimaksudkan untuk membuat penilaian menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan lebih konsisten di seluruh penilaian.

Penetapan Kondisi

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.16 “Penetapan kondisi”
- 7.18 “Laporan Draf Tinjauan Klien dan Rekan Sejawat”
- 7.28 “Pengawasan”
- 7.30 “Penilaian Ulang”

Informasi latar belakang

MSC sedang mempertimbangkan proses bagaimana tim asesor menetapkan syarat sertifikasi, menetapkan tenggat waktu untuk syarat-syarat tersebut, dan memantau kemajuannya dari waktu ke waktu.

Saat ini, perikanan diberi waktu lima tahun untuk menyelesaikan persyaratan, dengan kemajuan dipantau pada setiap audit pengawasan. Namun, karena lamanya proses penilaian ulang, kesempatan audit terakhir untuk memantau kemajuan persyaratan biasanya terjadi pada audit pengawasan keempat. Ini berarti bahwa pada kenyataannya, banyak perikanan hanya memiliki waktu empat tahun untuk menyelesaikan persyaratan sebelum mereka dapat memasuki tahap penilaian ulang.

Dalam keadaan luar biasa, asesor diizinkan untuk menetapkan persyaratan dengan batas waktu yang melampaui jangka waktu standar lima tahun. Namun, apa yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” dan kapan hal ini dapat diterapkan saat ini masih belum jelas. Memantau kondisi ini dari waktu ke waktu juga menantang, terutama ketika suatu usaha perikanan memiliki beberapa unit penilaian dengan persyaratan dan batas waktu yang berbeda-beda.

Persyaratan akan diperbarui untuk memastikan pelacakan persyaratan yang jelas dan transparan dari waktu ke waktu. Persyaratan juga telah diperjelas untuk memastikan bahwa proses penetapan persyaratan jelas dan bahwa tim asesor yakin mengenai kapan dan bagaimana batas waktu yang diperpanjang dapat diterapkan dan dibenarkan.

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan membuat ketentuan lebih mudah diidentifikasi, dilacak, dan dipahami selama proses sertifikasi perikanan. Setiap ketentuan akan memiliki nomor unik yang tidak berubah seiring waktu. Persyaratan yang menstandarkan cara penyajian tenggat waktu ketentuan telah ditambahkan.

Proses penetapan syarat dan tanggung jawab yang terkait telah diperjelas. Tim asesor akan menetapkan syarat dan batas waktu awal, namun tidak lagi menetapkan tonggak pencapaian

sebelum menyerahkannya kepada klien untuk ditinjau. Sebaliknya, klien di sektor perikanan akan merumuskan tindakan dan hasil yang diharapkan untuk memenuhi syarat tersebut dalam Rencana Aksi Klien mereka, dan setelah menerima Rencana Aksi Klien tersebut, tim asesor akan menggunakan informasi ini untuk menetapkan batas waktu akhir syarat dan menetapkan tonggak verifikasi yang jelas guna memantau kemajuan.

Jangka waktu standar untuk penutupan syarat tetap kurang dari atau sama dengan lima tahun. Telah diklarifikasi bahwa keadaan luar biasa hanya mencakup hal-hal yang berada di luar kendali klien. Keadaan tersebut dapat diterapkan oleh tim asesor untuk memperpanjang batas waktu syarat melebihi lima tahun hanya saat syarat tersebut pertama kali ditetapkan dan harus melalui tinjauan sejawat. Telah diklarifikasi bahwa kelonggaran keadaan luar biasa tidak dapat digunakan kemudian hanya untuk memperpanjang batas waktu atau menghindari penangguhan.

Pemantauan syarat juga telah disederhanakan. Kemajuan akan dijelaskan sebagai pencapaian tonggak yang “terpenuhi” atau “tidak terpenuhi”, bukan menggunakan istilah sebelumnya “sesuai target” dan “tertinggal dari target”. Klien dapat merevisi Rencana Tindakan Klien (Client Action Plan) jika diperlukan tindakan perbaikan, namun kegagalan memenuhi tonggak pada audit berturut-turut akan mengakibatkan penangguhan.

Terakhir, audit pengawasan kelima telah diperkenalkan untuk perikanan yang masih memiliki ketentuan yang belum terpenuhi setelah audit keempat, guna memastikan bahwa ketentuan jangka panjang dan pertengahan siklus terus diperiksa setiap tahun (lihat [klarifikasi mengenai proses penilaian ulang](#)).

Secara keseluruhan, perubahan yang diusulkan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sambil menjaga agar proses tetap praktis dan kredibel.

Draf Laporan Komentar Pengumuman (ACDR) pada penilaian ulang dan klarifikasi mengenai proses penilaian ulang

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.30 “Penilaian Ulang”

Informasi latar belakang

Menindaklanjuti masukan dari komunitas asesor dan pemangku kepentingan perikanan, MSC sedang mempertimbangkan apakah Laporan Draf Komentar Pengumuman (ACDR) masih diperlukan selama penilaian ulang, dengan tujuan menjadikan proses tersebut lebih efisien. Aspek lain dari proses penilaian ulang dan jadwalnya, seperti kebutuhan akan kunjungan lapangan penilaian ulang yang tumpang tindih dan audit pengawasan keempat, juga sedang direvisi.

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan bertujuan untuk membuat penilaian ulang lebih efisien, sekaligus memberikan ekspektasi yang lebih jelas terkait perencanaan, waktu, dan pengawasan yg sedang berlangsung.

Laporan Draf Komentar Pengumuman (ACDR) tidak lagi diwajibkan untuk penilaian ulang. Sebagai gantinya, diusulkan agar CAB menerbitkan rencana penilaian ulang dan analisis perubahan pada saat pengumuman penilaian ulang, menggunakan templat khusus (yang merupakan bagian dari pengumuman), untuk menjelaskan apa yang telah berubah sejak penilaian sebelumnya dan aspek penilaian mana yang perlu ditinjau kembali.

Jadwal penilaian ulang juga telah dibuat lebih terstruktur. Sebagaimana yang sebelumnya ditetapkan, batas waktu pemenuhan persyaratan dipatok pada tanggal peringatan sertifikat untuk menjamin konsistensi dan transparansi. Namun, untuk menangani unit perikanan yang masih memiliki persyaratan yang belum terpenuhi setelah audit pengawasan keempat, diusulkan agar audit pengawasan kelima diperkenalkan jika diperlukan (misalnya, unit perikanan dengan batas waktu pemenuhan persyaratan lima tahun atau lebih, atau unit perikanan yang memiliki persyaratan yang diajukan di tengah masa sertifikasi dengan batas waktu pada periode penilaian ulang berikutnya). Audit ini akan terpisah dari proses penilaian ulang dan tidak perlu diselesaikan dalam batas waktu penilaian ulang. Audit ini akan dilaksanakan sebagai audit pengawasan biasa, di mana jangka waktu enam bulan tetap berlaku.

Secara keseluruhan, revisi ini dimaksudkan untuk memastikan efisiensi proses penilaian ulang, meningkatkan transparansi seputar ruang lingkup penilaian ulang, menciptakan proses yang lebih jelas dan dapat diprediksi bagi CAB dan perikanan, serta meningkatkan kredibilitas melalui penegakan pengawasan tahunan terhadap persyaratan.

Ketertelusuran dan keselarasan dengan Tinjauan Rantai Pengawasan (CoC) MSC

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.17 “Penentuan keterlacakan dan kelayakan produk”

Informasi latar belakang

Saat menilai suatu perikanan berdasarkan Standar MSC, CAB terutama mendefinisikan apa yang akan dicakup oleh sertifikat sebagai Unit Sertifikasi. Saat meninjau sistem ketertelusuran dalam perikanan tertentu, CAB juga harus menentukan pihak dan kategori pihak yang memenuhi syarat untuk menggunakan sertifikat untuk tujuan Rantai Pengawasan (CoC).

Persyaratan ketertelusuran dalam penilaian perikanan memainkan peran penting dalam menjaga integritas produk bersertifikat MSC sepanjang rantai pasokan. Namun, jenis informasi yang dikumpulkan dan cara informasi tersebut dipertimbangkan saat ini bervariasi antar penilaian, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam menentukan apa yang termasuk dalam cakupan sertifikat. Hal ini, pada gilirannya, dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai di mana cakupan CoC dimulai.

Revisi ini bertujuan untuk mewujudkan standarisasi lebih lanjut terhadap informasi keterlacakan yang dikumpulkan selama penilaian perikanan. Revisi ini juga bertujuan untuk memperjelas di mana CoC dimulai, dan bagaimana CAB menentukan pihak serta aktivitas mana yang harus dicakup oleh sertifikat perikanan tersebut. Perubahan ini juga akan diperkuat oleh [tinjauan Standar Rantai Pengawasan MSC](#) yang sedang berlangsung.

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan memperjelas bagaimana penelusuran harus dinilai dalam suatu perikanan dan di mana tanggung jawab beralih dari sertifikasi perikanan ke sertifikasi Rantai Pengawasan (CoC).

Berdasarkan pendekatan yang direvisi, sertifikat perikanan akan mencakup kegiatan hingga proses pendaratan, sedangkan sertifikasi CoC secara default dimulai pada saat pendaratan, karena di sinilah sebagian besar sistem kepatuhan perikanan berakhir. Dengan perubahan ini, MSC bermaksud memperjelas titik ‘serah terima’ antara penilaian perikanan dan audit CoC, serta titik masuk ke rantai pengawasan bersertifikat selanjutnya. Hal ini memberikan visibilitas lengkap mengenai ketertelusuran dan kelayakan untuk masuk ke rantai pasokan bagi auditor CoC.

Jika risiko keterlusuran mengharuskannya, CAB dapat menggunakan penilaian ahli berdasarkan risiko yang teridentifikasi untuk mewajibkan sertifikasi CoC dimulai lebih awal, misalnya pada tahap *transshipment*. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan batas yang lebih jelas dan konsisten antara sertifikasi perikanan dan sertifikasi CoC, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi perikanan dengan pengaturan operasional yang berbeda.

Seperti sebelumnya, CAB diwajibkan untuk menilai bagaimana produk bergerak melalui kegiatan penangkapan ikan, risiko ketertelusuran yang muncul sebelum pendaratan, serta pengendalian yang diterapkan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Penilaian tersebut juga akan mempertimbangkan titik-titik pendaratan yang relevan, informasi yang tersedia bagi pemegang sertifikat CoC pertama, serta apakah telah ada pengaturan yang efektif untuk menjaga pemisahan dan integritas produk pada saat serah terima antara kegiatan penangkapan ikan dan CoC. Persyaratan-persyaratan ini telah dijelaskan dalam usulan tersebut.

Penentuan keterlacakan dalam penilaian akan didasarkan pada evaluasi yang proporsional dan berbasis bukti terhadap risiko serta pengendalian yang relevan dengan sertifikat perikanan. Metode penilaian terperinci dijabarkan dalam pedoman, termasuk Elemen Data Utama (KDE) perikanan tertentu, yang membantu mengurangi duplikasi antara penilaian perikanan dan CoC sambil tetap menjamin integritas produk bersertifikat.

Revisi ini juga memperjelas bagaimana penentuan ketertelusuran harus dicatat dan dilaporkan, termasuk pada sertifikat perikanan dan dalam templat pelaporan yang relevan. Templat baru, yaitu Templat Sertifikat Perikanan, akan memastikan transparansi bagi pembeli pertama dan auditor CoC.

Perubahan yang diusulkan memperjelas bahwa tanggal kelayakan produk bersertifikat dari Unit Sertifikasi yang baru disertifikasi dan yang sertifikatnya terus berlanjut untuk memasuki rantai pengawasan lebih lanjut adalah tanggal publikasi Laporan Sertifikasi Publik (PCR). Perubahan tersebut juga memperkenalkan proses audit yang dipercepat jika penentuan ketertelusuran negatif sebelumnya perlu ditinjau kembali.

Tangkapan yang tidak dapat dipisahkan (sebelumnya dikenal sebagai tangkapan yang tidak dapat dipisahkan dan secara praktis tidak dapat dipisahkan)

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.17 “Penentuan keterlacakan dan kelayakan produk”

Informasi latar belakang

MSC sedang merevisi persyaratan umum untuk tangkapan yang tidak dapat dipisahkan atau praktis tidak dapat dipisahkan (IPI) guna memperjelas bagaimana tangkapan tersebut harus ditangani dalam sistem sertifikasi dan untuk memperkuat jaminan seputar masuknya tangkapan tersebut ke dalam rantai pasokan bersertifikat.

Persyaratan saat ini tidak selalu memberikan kejelasan yang cukup mengenai cara menghitung persentase tangkapan IPI, cara menilai spesies IPI yang relevan berdasarkan Prinsip 2, atau cara mengidentifikasi dan mengelola tangkapan IPI setelah masuk ke rantai pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penilaian dan meningkatkan risiko bahwa tangkapan yang tidak terpisahkan tidak cukup terlihat atau dapat dilacak dalam aliran produk bersertifikat.

Oleh karena itu, revisi ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan yang lebih jelas dan transparan terkait kelayakan IPI, yang terkait dengan keterlacakan dan titik masuk produk ke dalam rantai pengawasan. Revisi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan tangkapan IPI tercermin dengan jelas dalam informasi sertifikasi, bahwa harapan keterlacakan diperkuat, dan bahwa langkah-langkah perlindungan keberlanjutan yang sesuai diterapkan jika spesies IPI memenuhi kriteria penilaian yang relevan berdasarkan Prinsip 2.

Ringkasan usulan

Persyaratan untuk penilaian tangkapan yang tidak dapat dipisahkan sebelumnya tercantum dalam lampiran tersendiri dari Proses Sertifikasi Perikanan (FCP) (Lampiran PA) dan dalam persyaratan proses FCP. MSC mengusulkan untuk menghapus persyaratan ini dari Lampiran PA dan bagian ‘IPI’ sebelumnya dalam persyaratan proses FCP. Sebagai gantinya, perubahan ini mengintegrasikan penilaian tangkapan yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya ke dalam Bagian 7.17, “Penentuan ketertelusuran dan kelayakan produk”, sebagai persyaratan mengenai kelayakan tangkapan tersebut untuk masuk ke rantai pengawasan bersertifikat selanjutnya.

Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas bahwa tangkapan yang tidak dapat dipisahkan harus diperlakukan sebagai masalah kelayakan yang dikendalikan, terkait dengan pertimbangan keterlacakan produk bersertifikat dan transparansi sertifikat perikanan.

Melalui usulan ini, MSC menegaskan bahwa Prinsip 1 (P1) tetap menjadi pendekatan standar untuk menilai tangkapan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, terdapat kasus-kasus di mana tangkapan stok non-target yang dinilai berdasarkan Prinsip 2 (P2) tidak dapat dipisahkan dari stok target P1. Spesies apa pun dalam P2 yang telah dikategorikan sebagai ETP dan/atau 'di luar cakupan' (spesies burung, mamalia, amfibi, atau reptil) tidak dapat dipertimbangkan untuk penentuan tangkapan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, hanya stok ikan dan invertebrata non-ETP yang dinilai berdasarkan P2 yang dapat melanjutkan proses sesuai persyaratan ini.

Kelayakan stok P2 untuk masuk ke rantai pengawasan bersertifikat selanjutnya ditentukan oleh kriteria berikut:

- Tangkapan memenuhi kriteria khusus untuk menentukan ketidakterpisahannya secara biologis atau operasional dari stok target.
- Terdapat justifikasi yang didukung bukti untuk tidak memasukkan dan menilai stok tersebut berdasarkan Prinsip 1.
- Tangkapan tersebut tidak melebihi batas atas sebesar 15% berdasarkan berat dari total pendaratan yang relevan dari spesies/stok tersebut dan stok sasaran P1.

Revisi tersebut mencakup panduan tambahan mengenai cara menentukan perhitungan tangkapan $\leq 15\%$.

Tangkapan yang tidak dapat dipisahkan yang telah ditetapkan memenuhi syarat harus diidentifikasi dalam laporan penilaian dan Pernyataan Sertifikat Perikanan yang baru. Persyaratan baru menetapkan bahwa CAB harus terus memeriksa kelayakan pada saat penilaian ulang.

Jalur di atas untuk menentukan kelayakan tangkapan yang tidak dapat dipisahkan agar dapat masuk ke dalam rantai pasokan dimaksudkan sebagai pengecualian terbatas untuk skenario yang memenuhi kriteria eksplisit – bukan sebagai alternatif dari penilaian berdasarkan P1. Secara keseluruhan, persyaratan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan penentuan keberlanjutan tangkapan yang tidak dapat dipisahkan dalam program MSC.

Penambahan pada sertifikat perikanan (penambahan nelayan lain yang memenuhi syarat, audit yang dipercepat, dan perluasan cakupan)

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.5 “Ruang lingkup penilaian: mendefinisikan UoA dan UoC yang diusulkan”
- 7.26 “Penambahan kapal ke sertifikat perikanan (mengubah UoC)”
- 7.29 “Audit yang dipercepat”
- Lampiran PA “Penilaian perluasan cakupan – normatif”

Informasi latar belakang

Persyaratan saat ini untuk menambahkan “nelayan lain yang memenuhi syarat”, menambahkan kapal, dan melakukan perluasan ruang lingkup saling tumpang tindih, sehingga mengakibatkan interpretasi dan penerapan yang tidak konsisten oleh CAB serta kurangnya transparansi.

Oleh karena itu, MSC sedang mengerjakan revisi untuk memperjelas proses penambahan nelayan atau entitas lain yang memenuhi syarat ke dalam sertifikat. Hal ini akan memastikan para asesor mengambil pendekatan yang lebih konsisten.

Revisi ini bertujuan untuk mengatasi kebingungan yang telah berlangsung lama terkait berbagai jalur yang tersedia untuk memperpanjang sertifikat dan memperluas ruang lingkup penilaian, yang meliputi analisis kesenjangan, audit dipercepat, dan perluasan ruang lingkup.

Ringkasan usulan

Revisi yang diusulkan bertujuan untuk memperjelas prosedur penambahan kapal atau entitas lain yang memenuhi syarat ke dalam sertifikat MSC yang sudah ada (memperluas Unit Sertifikasi), serta untuk membedakan penambahan tersebut secara lebih jelas dari penambahan yang memerlukan perluasan cakupan (memperluas Unit Penilaian).

Proses penambahan ke dalam sertifikat kini didasarkan pada apakah penambahan yang diusulkan termasuk dalam Unit Penilaian (UoA) yang telah ditetapkan dan apakah penambahan tersebut telah dinilai sebelumnya.

Empat jalur untuk menambahkan kapal ke dalam sertifikat telah dikembangkan dan dikodifikasi dalam persyaratan yang diusulkan.

- 1) Pada jalur pertama, kapal yang telah dinilai sebagai bagian dari penilaian awal dapat ditambahkan langsung ke sertifikat. Sebelum melakukannya, Lembaga Penilaian Kesesuaian (CAB) harus memeriksa apakah penambahan yang diusulkan memenuhi persyaratan ruang lingkup dalam Standar. Setelah hal ini ditentukan, Pernyataan Sertifikat Perikanan akan diperbarui, yang mencakup pemeriksaan terhadap keterlacakan.
- 2) Pada jalur kedua, jika sebuah kapal sebelumnya belum pernah dinilai tetapi termasuk dalam definisi UoA yang ada, CAB akan menentukan apakah penambahannya memerlukan audit percepatan. Jika tidak memicu audit percepatan, kapal tersebut dapat ditambahkan ke sertifikat dan dampaknya akan dievaluasi pada audit pengawasan berikutnya.
- 3) Jalur ketiga berlaku jika audit dipercepat dipicu. Penambahan tersebut harus dievaluasi dan dinyatakan memenuhi Standar *sebelum* dapat ditambahkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit dipercepat, atau pemegang sertifikat dapat menunggu hingga audit pengawasan berikutnya.
- 4) Jalur terakhir dan keempat berlaku jika penambahan tersebut jelas berada di luar cakupan UoA yang ada sebagaimana telah didefinisikan. Dalam hal ini, diperlukan perluasan cakupan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan perluasan cakupan, silakan lihat [ringkasan usulan untuk Lampiran PA](#).

Untuk mendukung usulan tersebut, persyaratan UoA dan UoC telah diurutkan ulang, dengan panduan tambahan mengenai cara mendefinisikannya. Penekanan khusus diberikan pada definisi yang jelas mengenai kapal, armada, kelompok, atau operator penangkapan ikan yang termasuk dalam UoA, karena definisi ini menentukan proses yang berlaku ketika kapal ditambahkan ke sertifikat di kemudian hari.

Konsep terpisah mengenai “nelayan lain yang memenuhi syarat” telah dihapus untuk mengurangi kebingungan. Nelayan atau kapal yang termasuk dalam UoA tetapi awalnya tidak termasuk dalam UoC dapat diidentifikasi melalui hubungan antara keduanya. Proses “analisis kesenjangan” terpisah, yang sebelumnya digunakan untuk menambahkan “nelayan lain yang memenuhi syarat”, juga telah dihapus dan digantikan dengan persyaratan yang lebih jelas yang mengarahkan CAB ke jalur penilaian yang sesuai.

Revisi lebih lanjut telah dilakukan pada 7.29 “Audit yang dipercepat” untuk memperjelas bahwa audit yang dipercepat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan ruang lingkup Standar Perikanan.

Selain perubahan-perubahan ini, MSC mengusulkan penggunaan templat wajib saat menyerahkan daftar kapal (lihat [Templat Informasi Kapal](#) dalam dokumen ini). Templat ini akan memastikan konsistensi saat tinjauan kelayakan ruang lingkup dan penelusuran dilakukan pada audit pengawasan jika terdapat perubahan pada daftar kapal.

Revisi yang diusulkan ini membuat penambahan kapal ke sertifikat yang sudah ada menjadi lebih jelas dan konsisten, sehingga meningkatkan transparansi.

Pemisahan sertifikat

Referensi dalam DRAFT FCP v4.0

- 7.27 “Penggabungan dan pemisahan sertifikat perikanan”

Informasi latar belakang

Ada beberapa kasus di mana Unit Sertifikasi (UoC) yang berbagi satu sertifikat perlu dipindahkan ke sertifikat terpisah agar aspek-aspek sertifikasi mereka dapat dikelola secara mandiri. Namun, proses “pemisahan sertifikat” ini belum memiliki prosedur resmi dalam FCP v3.1 maupun versi-versi sebelumnya.

Untuk menangani situasi di mana pemisahan sertifikat dianggap tepat, MSC bermaksud untuk membuat proses yang jelas dan konsisten.

Ringkasan usulan

Dalam usulan ini, bagian 7.28 FCP “Penggabungan sertifikat perikanan” telah diperluas untuk mencakup opsi pemisahan sertifikat perikanan. Pemisahan sertifikat harus dilakukan pada saat audit pengawasan untuk memastikan transparansi bagi MSC dalam melakukan pengawasan teknis dan bagi pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menyampaikan komentar. Audit pengawasan juga memberikan manfaat berupa pelaporan perubahan skor, persyaratan, keterlacakan, dan aspek sertifikasi lainnya, sehingga ini merupakan waktu yang tepat dan efisien untuk mengusulkan pemisahan sertifikat daripada menggunakan mekanisme pelaporan terpisah.

Persyaratan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Unit Penilaian, dan oleh karena itu skor serta persyaratan, tidak dapat dipisahkan menggunakan proses ini.

Revisi terhadap Lampiran PA

Persyaratan perluasan cakupan

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- Lampiran PA “Penilaian perluasan cakupan – normatif”

Informasi latar belakang

Lihat informasi latar belakang mengenai [Penambahan pada Sertifikat Perikanan](#).

Ringkasan usulan

Pemindahan persyaratan perluasan cakupan dari Lampiran PD ke Lampiran PA

Dalam versi v3.1 dan versi sebelumnya dari FCP, Lampiran PA menetapkan persyaratan untuk tangkapan yang tidak terpisahkan (dikenal sebagai IPI). Persyaratan untuk tangkapan yang tidak terpisahkan telah dihapus dari lampiran mandiri ini dalam FCP, dan sebaliknya diatasi sebagai masalah kelayakan yang terkait dengan persyaratan pelacakan dan masuk ke rantai pengawasan bersertifikat selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [ringkasan usulan untuk tangkapan yang tidak terpisahkan](#).

Untuk menjaga konsistensi format lampiran FCP dengan versi sebelumnya, persyaratan perluasan cakupan telah dipindahkan ke Lampiran PA dari letak sebelumnya di Lampiran PD. Lampiran PE sebelumnya, untuk “Penilaian transisi”, telah dihapus sepenuhnya, sehingga lampiran terakhir FCP akan menjadi Lampiran PC, “Kualifikasi dan kompetensi pemimpin tim perikanan, anggota tim, tim, dan peninjau sejawat”.

Revisi terhadap persyaratan penilaian perluasan cakupan

Untuk lebih membedakan penambahan pada sertifikat perikanan dari perluasan ruang lingkup penilaian, MSC telah melakukan beberapa revisi klarifikasi pada Lampiran PA. Pertama-tama, semua persyaratan untuk penilaian perluasan ruang lingkup dalam FCP telah dipindahkan dan digabungkan ke dalam Lampiran PA.

Referensi mengenai langkah “analisis kesenjangan”, yang sebelumnya dikaitkan dengan penilaian perluasan cakupan sebagai langkah utama, kini telah dihapus. Analisis kesenjangan pada awalnya dimaksudkan untuk memetakan komponen penilaian dan elemen penilaian mana saja yang terdapat pada UoA yang ada dan yang diusulkan. Jika komponen penilaian dan elemen penilaian tersebut identik antara UoA yang ada dan yang diusulkan, maka hal tersebut dapat ditambahkan ke dalam sertifikat. Jika tidak, maka diperlukan perluasan cakupan. Selanjutnya, sebuah Interpretasi diterbitkan untuk memungkinkan penambahan kapal di mana komponen penilaian dan elemen penilaian tidak identik, tetapi

CAB menetapkan bahwa penambahan tersebut tidak akan memengaruhi penilaian. Namun, hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan di antara berbagai CAB dan kebingungan mengenai apa yang dapat atau tidak dapat ditambahkan. Revisi yang diusulkan terhadap 7.28 “Penambahan pada sertifikat perikanan” – serta terhadap proses penetapan ruang lingkup penilaian dalam 7.5 – memperjelas batasan mengenai apa yang termasuk dalam definisi UoA, sehingga menghilangkan kebutuhan akan langkah analisis kesenjangan.

Penyuntingan dan klarifikasi kecil tambahan telah dilakukan pada Lampiran PA untuk mengurangi kompleksitas.

Revisi terhadap Lampiran PB

Proses harmonisasi dan hasilnya

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- 7.8.3 “Kriteria untuk identifikasi UoA yang tumpang tindih”
- Lampiran PB “Unit Penilaian yang Diselaraskan – normatif”

Informasi latar belakang

Proses harmonisasi diterapkan pada perikanan yang tumpang tindih untuk memastikan hasil penilaian konsisten. Tinjauan ini akan menjelaskan bagaimana asesor harus menerapkan proses tersebut, termasuk menetapkan tingkat di mana perikanan harus diselaraskan.

Hal ini mencakup pertimbangan apakah harmonisasi harus dilakukan pada tingkat Indikator Kinerja atau Masalah Penilaian, serta apakah harmonisasi tersebut harus diterapkan pada skor tertentu atau hanya pada hasil lulus/gagal secara keseluruhan. Tinjauan ini juga akan membahas kesulitan dalam menyelaraskan Prinsip 2, serta kurangnya kejelasan dalam menerapkan proses tersebut pada Prinsip 3.

Tinjauan ini juga akan mempertimbangkan apakah perlu merevisi proses saat ini, di mana skor terendah diberikan jika asesor tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai cara mengkonsolidasikan penilaian.

Ringkasan usulan

Revisi yang diusulkan secara substansial memperbarui Lampiran PB untuk membuat harmonisasi menjadi lebih sederhana, lebih terfokus, dan tidak terlalu memberatkan, sekaligus memastikan bahwa perikanan yang tumpang tindih mencapai hasil penilaian yang konsisten jika hal ini penting.

Pemicu harmonisasi telah dibuat lebih jelas. Harmonisasi akan dipicu jika perikanan memiliki unit penilaian (UoA) yang tumpang tindih yang menargetkan stok Prinsip 1 (P1) yang sama atau dengan elemen penilaian Prinsip 2 (P2) yang sama. UoA yang tumpang tindih akan diidentifikasi selama proses penilaian, dengan persyaratan yang lebih jelas untuk mengkomunikasikan waktu dan hasil harmonisasi.

Dalam proposal ini, cakupan harmonisasi berbeda-beda menurut Prinsip. Untuk P1, sebagian besar Isu Penilaian (SI) harus diselaraskan, kecuali jika suatu SI bersifat spesifik bagi suatu UoA tertentu. Penentuan stok kunci pada tingkat trofik rendah juga harus diselaraskan. Untuk P2, harmonisasi berfokus pada kategorisasi spesies dan SI Hasil yang dipilih, termasuk skor

atribut produktivitas di mana Kerangka Kerja Berbasis Risiko (RBF) digunakan untuk menilai suatu elemen penilaian. Untuk P3, harmonisasi terbatas pada PI 3.1.1(a) dan PI 3.2.3(a), dengan memfokuskan upaya pada area di mana konsistensi antara perikanan yang tumpang tindih paling penting.

Usulan ini menjelaskan bahwa harmonisasi harus memastikan bahwa SI yang sama mencapai Titik Acuan Penilaian (SG) yang sama di seluruh UoA yang tumpang tindih. Batas waktu kondisi harus diselaraskan, sementara tonggak pencapaian dapat tetap spesifik untuk masing-masing perikanan (yaitu, harmonisasi tonggak pencapaian tidak diwajibkan). Dengan demikian, hasil harmonisasi menjadi lebih jelas. Persyaratan yang lebih jelas untuk menangani perbedaan antar perikanan juga disediakan. Perbedaan yang dapat dibuktikan antara UoA dapat dipertimbangkan jika terdapat bukti bahwa perikanan tersebut benar-benar berbeda sedemikian rupa sehingga memengaruhi hasil penilaian.

Persyaratan yang diperbarui secara jelas membedakan antara harmonisasi tahunan dan harmonisasi yang dipercepat. Harmonisasi tahunan menyediakan proses rutin untuk menyepakati hasil, sedangkan harmonisasi yang dipercepat dapat dipicu ketika informasi baru secara signifikan mengubah hasil penilaian, seperti ketika skor Indikator Kinerja turun di bawah 60 atau skor Prinsip turun di bawah 80.

Terakhir, usulan ini mengubah dan memperkuat pendekatan terhadap ketidaksepakatan dalam harmonisasi. Alih-alih menerapkan pendekatan “skor terendah yang menang”, sebagaimana proses saat ini, mekanisme baru telah dikembangkan di mana ketidaksepakatan yang belum terselesaikan dapat ditingkatkan ke peninjau independen yang ditunjuk oleh [Peer Review College \(PRC\)](#) [MSC](#). Eskalasi ini hanya akan terjadi jika terdapat ketidaksepakatan yang belum terselesaikan di antara tim asesor yang terlibat dalam harmonisasi.

Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dengan membuat identifikasi UoA yang tumpang tindih, waktu harmonisasi, dan keputusan yang dihasilkan menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan, sekaligus menghindari pekerjaan penilaian tambahan yang tidak perlu. Secara keseluruhan, pendekatan yang direvisi ini dimaksudkan untuk mencapai konsistensi yang bermakna antara perikanan yang tumpang tindih tanpa memerlukan harmonisasi jika perbedaan antara perikanan tersebut dapat dibuktikan.

Revisi terhadap Lampiran PC

Kompetensi pemimpin tim perikanan

Referensi dalam DRAFT FCP V4.0

- Lampiran PC, “Kualifikasi dan kompetensi pemimpin tim perikanan, anggota tim, tim, dan peninjau sejawat – normatif”

Informasi latar belakang

Sebagai bagian dari revisi FCP, MSC bertujuan untuk mengklarifikasi apakah seorang pemimpin tim asesor harus pernah bekerja sebelumnya sebagai *Principal Expert* (Ahli Prinsip)

Ringkasan usulan

Perubahan yang diusulkan memperjelas persyaratan kualifikasi dan kompetensi bagi Pemimpin Tim Penilaian Perikanan MSC serta memperluas jalur yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi syarat dalam peran tersebut.

Alih-alih mensyaratkan pengalaman sebelumnya sebagai Ahli Prinsip 1, 2, atau 3, calon Pemimpin Tim diharuskan mengikuti penilaian MSC secara penuh sebagai pengamat, kemudian bertindak sebagai Pemimpin Tim dalam suatu penilaian di bawah pengawasan Pemimpin Tim MSC yang berpengalaman. Hal ini memberikan jalur praktis untuk menunjukkan kompetensi dalam tugas dan tanggung jawab peran Pemimpin Tim.

Persyaratan kompetensi juga telah direvisi agar lebih fokus secara eksplisit pada keterampilan yang diperlukan untuk memimpin penilaian, termasuk perencanaan dan pembagian tugas, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, mengelola proses penilaian dan tim penilaian, menyelesaikan konflik, serta memastikan kontribusi pemangku kepentingan tercantum dalam laporan penilaian.

Perubahan ini bertujuan agar peran Pemimpin Tim dapat diakses oleh auditor, staf CAB, manajer, serta pakar utama yang memiliki pengalaman memadai dari latar belakang yang lebih beragam, asalkan mereka dapat menunjukkan kompetensi yang diperlukan. Perubahan ini juga menghapus persyaratan pengalaman akademis dan di sektor perikanan yang sebelumnya berlaku, serta kebutuhan akan pengawasan oleh badan akreditasi terhadap penilaian pertama seseorang sebagai Pemimpin Tim.

Revisi terhadap Templat Pelaporan MSC

MSC telah menyederhanakan templat pelaporan di seluruh proses penilaian dan penilaian ulang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, memastikan konsistensi di seluruh templat, serta meningkatkan kegunaan laporan dan lembar kerja bagi asesor, perikanan, pemangku kepentingan, Peninjau Sejawat, dan pembaca lainnya.

Perubahan pada templat juga telah dilakukan untuk menyelaraskan dengan revisi terhadap Standar dan Proses Sertifikasi Perikanan.

Secara keseluruhan, 12 templat telah diperbarui, empat templat telah dihapus, dan satu templat tambahan telah ditambahkan – yaitu Pernyataan Sertifikasi.

Templat Penilaian Perikanan

Ringkasan usulan

Halaman depan

Halaman depan telah disederhanakan untuk menyajikan informasi penilaian utama dalam format yang lebih jelas dan mudah diakses. Informasi yang sebelumnya tersebar di seluruh laporan telah digabungkan ke dalam tabel di tempat yang sesuai, sehingga detail penting lebih mudah ditemukan oleh pembaca.

Tabel Unit Penilaian

Tabel Unit Penilaian (UoA) telah direvisi untuk mendukung identifikasi UoA yang lebih jelas dan konsisten di seluruh laporan. Nama UoA telah disertakan untuk membantu pembaca membedakan antara beberapa UoA dan mendukung referensi yang konsisten di seluruh penilaian. Informasi mengenai wilayah geografis telah dihapus sesuai dengan perubahan yang sesuai pada definisi UoA dalam Proses Sertifikasi Perikanan.

Tabel Unit Sertifikasi

Informasi yang secara khusus berkaitan dengan Unit Sertifikasi (UoC) telah digabungkan di bagian akhir laporan, sehingga memisahkan informasi penilaian dan informasi terkait sertifikat dengan lebih jelas; informasi terkait sertifikat kini terdapat dalam Pernyataan Sertifikasi. Laporan ini juga akan mencakup deskripsi naratif mengenai 'Akses ke Sertifikasi' yang merujuk pada informasi UoC yang disediakan di bagian akhir laporan.

Tabel Penilaian

Tabel penilaian telah dirancang ulang untuk mendukung penilaian terhadap beberapa UoA sekaligus mengurangi pengulangan yang tidak perlu. Asesor dapat memberikan alasan penilaian bersama jika UoA sejalan dan mengidentifikasi pengecualian jika relevan. Alasan penilaian disajikan terpisah dari tabel penilaian itu sendiri, sehingga memberikan fleksibilitas

yang lebih besar untuk menyertakan teks, tabel, dan gambar pendukung. Persyaratan penilaian yang relevan juga ditandai untuk membantu asesor menerapkan Standar secara konsisten.

Untuk Laporan Draf Komentar Pengumuman, informasi yang sebelumnya diulang dalam tabel penilaian individu telah digabungkan ke dalam bagian awal laporan, sehingga penyajian informasi penilaian menjadi lebih sederhana.

Bukti pendukung

Bagian Latar Belakang yang sebelumnya telah dirumuskan ulang menjadi bagian Bukti Pendukung. Bagian ini menyediakan ruang khusus untuk informasi yang mendukung kesimpulan penilaian pada tingkat Prinsip, termasuk gambar, tabel, dan bukti yang mungkin perlu diulang di beberapa alasan penilaian.

Alasan penilaian akan tetap memuat semua informasi yang diperlukan untuk memperkuat skor individu, sementara bagian “Gambaran Umum Perikanan” yang terpisah akan tetap memuat informasi kontekstual dan historis yang lebih luas.

Bagian Ketertelusuran

Bagian Ketertelusuran telah ditata ulang dan dipindahkan ke bagian akhir laporan agar informasi sertifikasi dan *traceability* yang penting dapat lebih mudah digunakan dalam “Certification Statement”. Tabel *traceability* yang direvisi menyajikan informasi secara lebih konsisten mengenai akses ke sertifikat, kapal dan entitas lain yang memenuhi syarat, titik-titik di mana produk bersertifikat dapat masuk ke dalam “Chain of Custody”, serta persyaratan kelayakan produk yang berlaku.

Tabel kondisi

Tabel kondisi telah diformat ulang dan disimpan dalam lampiran. Struktur yang direvisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterbacaan dan memudahkan pemindahan informasi kondisi yang relevan ke dalam pelaporan pengawasan berikutnya tanpa duplikasi yang tidak perlu.

Tahap pelaporan

Informasi yang menjelaskan tahap penilaian saat ini akan disajikan dalam tabel standar, bukan melalui teks baku yang dapat diedit. Hal ini akan memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada pemangku kepentingan mengenai posisi penilaian dalam proses sertifikasi, kegiatan apa saja yang sedang berlangsung, dan peluang apa saja yang tersedia bagi partisipasi pemangku kepentingan.

Tinjauan sejawat

Informasi tinjauan sejawat telah dipindahkan ke lampiran bersama dengan komentar pemangku kepentingan, sehingga memberikan lokasi yang lebih konsisten untuk masukan eksternal yang diterima selama penilaian.

Rekomendasi

Terminologi yang digunakan untuk pengamatan non-wajib yang dibuat oleh tim penilaian sedang direvisi untuk membedakannya dengan lebih jelas dari persyaratan konsultasi atau sertifikasi formal. Template ini akan menyediakan tempat khusus bagi asesor untuk mencatat peluang perbaikan jika diperlukan, sambil mengakui bahwa hal ini terpisah dari persyaratan sertifikasi.

Prinsip 2: Komposisi tangkapan

Telah ditambahkan bagian khusus untuk melaporkan informasi komposisi tangkapan yang relevan dalam Prinsip 2. Hal ini memberikan konsistensi yang lebih besar dalam penyajian informasi ini sekaligus memberikan fleksibilitas kepada asesor jika komposisi tangkapan bukanlah informasi utama yang digunakan untuk menentukan hasil penilaian.

Titik acuan

Tabel Titik Acuan terpisah yang sebelumnya terkait dengan PI 1.1.1 telah dihapus. Informasi titik acuan yang relevan akan dimasukkan langsung ke dalam dasar penilaian yang berlaku, di mana informasi tersebut dapat disajikan bersamaan dengan bukti dan alasan yang mendukung skor tersebut.

Template Komentar Pemangku Kepentingan

Ringkasan usulan

Template Komentar Pemangku Kepentingan telah disederhanakan agar lebih mudah bagi pemangku kepentingan untuk memberikan komentar dan bagi tim asesor untuk memasukkannya ke dalam laporan penilaian. Pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi Indikator Kinerja yang relevan dengan komentar mereka, alih-alih menelusuri lembar kerja yang berisi setiap Indikator Kinerja yang mungkin ada.

Templat ini juga mendukung berbagai bahasa dan menyertakan hasil yang kompatibel dengan Microsoft Word untuk memudahkan pemindahan komentar ke dalam laporan penilaian.

Strukturnya telah distandarisasi untuk digunakan selama audit pengawasan serta penilaian awal dan penilaian ulang.

Template Pernyataan Sertifikasi

Ringkasan usulan

Pernyataan Sertifikasi akan menjadi sumber terpadu dari informasi operasional utama yang diperlukan untuk memahami bagaimana sertifikat perikanan dapat digunakan.

Informasi terkait sertifikat akan dikumpulkan dari laporan penilaian, termasuk Unit Sertifikasi, kapal, dan entitas lain yang memenuhi syarat untuk mengakses sertifikat, titik pendaratan yang memenuhi syarat dan lokasi relevan lainnya, titik di mana Rantai Pengawasan dimulai, serta persyaratan khusus apa pun yang menentukan apakah produk memenuhi syarat untuk dijual sebagai produk bersertifikat MSC.

Bagian Ketertelusuran dan tabel terkait telah direstrukturisasi untuk mendukung penyusunan pernyataan ini secara konsisten dan memudahkan pemegang sertifikat, pembeli pertama, auditor Rantai Pengawasan, serta pengguna lain untuk mengakses informasi yang relevan.

Lembar Kerja Penilaian

Ringkasan usulan

Lembar Kerja Penilaian MSC telah direvisi agar tim asesor dapat memberikan skor dan mencatat informasi untuk beberapa UoA dalam satu lembar kerja. Format keluaran yang kompatibel dengan Word juga telah diperkenalkan untuk memudahkan pemindahan informasi penilaian yang telah diselesaikan ke dalam laporan penilaian. Strukturnya tetap mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kombinasi Masalah Penilaian yang diwajibkan berdasarkan Standar Perikanan MSC.

Pengumuman Penilaian Perikanan / Rencana Penilaian Ulang

Ringkasan usulan

Dokumen pengumuman telah diperluas untuk mencakup pengumuman penggunaan Kerangka Kerja Berbasis Risiko (RBF) dalam suatu penilaian. Rencana Penilaian Ulang khusus untuk perikanan yang akan menjalani penilaian ulang juga telah dimasukkan ke dalam Template Pengumuman. Rencana tersebut akan merangkum riwayat kondisi yang relevan dan mengidentifikasi area di mana skor telah berubah, atau dapat secara wajar diharapkan akan berubah, sejak penilaian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu tim penilaian dan pemangku kepentingan memahami area yang memerlukan perhatian khusus selama penilaian ulang serta mendukung proses penilaian yang lebih terfokus. Rencana tersebut akan diisi sebagai pengganti penerbitan Laporan Draf Komentar Pengumuman pada saat penilaian ulang (lihat [perubahan pada proses penilaian ulang](#)).

Template Permintaan Informasi Klien (sebelumnya 'Daftar Periksa Dokumen Klien')

Ringkasan usulan

Daftar Periksa Dokumen Klien (Client Document Checklist) telah diganti namanya menjadi Permintaan Informasi Klien (Client Information Request) dan diformat ulang secara substansial untuk menyediakan mekanisme yang lebih jelas dan berguna dalam mengumpulkan informasi dari klien. Pertanyaan-pertanyaan telah diorganisasi ulang untuk mengurangi duplikasi antara bidang-bidang yang tumpang tindih dalam Standar Perikanan dan agar permintaan informasi lebih mudah dipahami dan diisi oleh klien.

Penghapusan Rencana Tindakan Klien

Ringkasan usulan

Templat Rencana Tindakan Klien yang terpisah akan dihapus. Sebagai gantinya, klien akan memberikan tanggapan mereka terhadap persyaratan secara langsung dalam Laporan Penilaian Perikanan yang relevan, sehingga menghindari duplikasi dan menyatukan informasi persyaratan serta tindakan yang direncanakan.

Templat Audit Pengawasan

Ringkasan usulan

Templat Pelaporan Pengawasan telah diperbarui agar lebih mencerminkan tujuan dan struktur audit pengawasan. Templat ini memprioritaskan informasi yang paling relevan bagi pembaca saat meninjau perkembangan sejak penilaian sebelumnya. Halaman depannya memberikan gambaran singkat tentang informasi utama yang mungkin berubah selama periode sertifikasi, sehingga pengguna dapat mengidentifikasi pembaruan penting dengan lebih cepat.

Templat Informasi Kapal

Ringkasan usulan

Templat Informasi Kapal yang baru telah dikembangkan untuk menstandarkan pengumpulan dan pelaporan informasi kapal di mana perikanan bersertifikasi MSC hanya mewakili sebagian dari armada yang lebih luas. Templat ini dimaksudkan untuk membuat informasi kapal lebih mudah diakses dan digunakan oleh para pemangku kepentingan sekaligus mendukung konsistensi dan transparansi yang lebih baik di seluruh program MSC.

Beberapa perubahan kecil yang terkait juga telah dilakukan pada Proses Sertifikasi Perikanan untuk memastikan bahwa informasi kapal yang diperlukan dikumpulkan dan dilaporkan dalam format yang disyaratkan.